



ANALISIS BELANJA DAERAH SEKTOR PENDIDIKAN, KESEHATAN  
DAN INFRASTRUKTUR TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN  
MANUSIA DAN PRODUKTIVITAS  
TENAGA KERJA DI KOTA  
MEDAN PROVINSI  
SUMATERA UTARA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mengikuti Ujian  
Seminar Proposal Pada Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh

NAMA : AGUS PARDOMUAN LAMBOK SILALAH  
NPM : 1515210122

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS SOSIAL DAN SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN  
PANCA BUDI  
MEDAN  
2019



**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : AGUS PARDOMUAN LAMBOK SILALAHI  
NPM : 1515210122  
PROGRAM STUDI : PEMBANGUNAN  
JENJANG : S1 (STRATA SATU)  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS BELANJA DAERAH SEKTOR PENDIDIKAN,  
KESEHATAN DAN INFRASTRUKTUR TERHADAP  
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN  
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DI KOTA MEDAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

MEDAN, AGUSTUS 2019

KETUA PROGRAM STUDI

(SAIMARA SEBAYANG, SE., M.Si)

DEKAN



PEMBIMBING I

(Drs H. KASIM SIYO., M.Si.Ph.D)

PEMBIMBING II

(RAHMAT SEMBIRING, SE., M.SP)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN**

**SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH  
PANITIA UJIAN SARJANA LENGKAP SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**

**PERSETUJUAN UJIAN**

**NAMA** : AGUS PARDOMUAN LAMBOK SILALAH!  
**NPM** : 1515210122  
**PROGRAM STUDI** : PEMBANGUNAN  
**JENJANG** : SI (STRATA SATU)  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS BELANJA DAERAH SEKTOR PENDIDIKAN,  
KESEHATAN DAN INFRASTRUKTUR TERHADAP  
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN  
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DI KOTA MEDAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

MEDAN, AGUSTUS 2019



**(SAIMARA SEBAYANG, SE., M.Si)**

**ANGGOTA II**

**(RAHMAT SEMBIRING, SE., M.SP)**

**ANGGOTA I**

**(Drs H. KASIM SIYO, M. Si. Ph.D)**

**ANGGOTA III**

**(Drs ANWAR SANUSI, M.Si)**

**ANGGOTA IV**

**(Dr MUHAMAD TOYIB DAULAY, SE., MM)**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : AGUS PARDOMUAN LAMBOK SILALAH  
NPM : 1515210122  
Fakultas/program studi : SOSIAL SAINS / PEMBANGUNAN  
Judul Skripsi : ANALISIS BELANJA DAERAH SEKTOR  
PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN  
INFRASTRUKTUR TERHADAP INDEKS  
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN  
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DI KOTA  
MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain.
2. Memberi izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Agustus 2019



(AGUS PARDOMUAN LAMBOK SILALAH)

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agus Pardomuan Lambok Silalahi  
Tempat/Tanggal lahir : Bagan Batu / 02 Agustus 1997  
NPM : 1515210122  
Fakultas : Sosial Sains  
Program Studi : Pembangunan  
Alamat : Jl. Perumahan Griya Permata III Blok AA No.08 Desa  
Tanjung Anom kec. Pancur Batu

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Agustus 2019

Yang membuat pernyataan



(Agus Pardomuan Lambok Silalahi)





# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

## FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

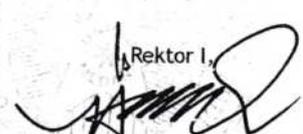
### PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

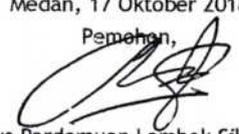
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

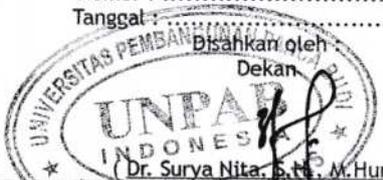
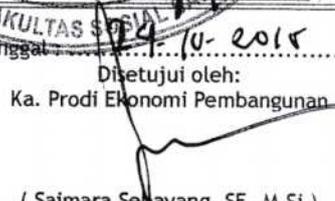
Nama Lengkap : AGUS PARDOMUAN LAMBOK SILALAH  
 Tempat/Tgl. Lahir : / 02 Agustus 1997  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1515210122  
 Program Studi : Ekonomi Pembangunan  
 Konsentrasi : Ekonomi Publik & SDA  
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 121 SKS, IPK 3.33  
 Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

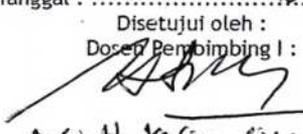
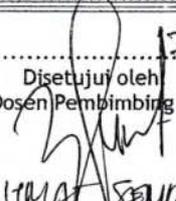
No.	Judul SKRIPSI	Persetujuan
1.	<del>Pengaruh</del> <sup>ANALISIS</sup> Pengaruh belanja daerah sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur terhadap Indeks pembangunan manusia dan Produktivitas tenaga kerja di kota Medan Provinsi Sumatera utara.	<input checked="" type="checkbox"/>
2.	Pengaruh belanja Modal, Pengangguran dan Kemiskinan terhadap Indeks pembangunan manusia dan Tingkat pendidikan Kabupaten/Kota Deli serdang di Provinsi Sumatera utara.	<input type="checkbox"/>
3.	Analisis Determinan Kerniskinan Masyarakat Perkotaan Terhadap Permukiman di Kota-kota Besar Indonesia.	<input type="checkbox"/>

NB : Judul yang disetujui oleh Kepala Program Studi diberikan tanda

  
 Rektor I,  
 ( Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D. )

Medan, 17 Oktober 2018  
 Pemohon,  
  
 ( Agus Pardomuan Lambok Silalahi )

Nomor : .....  
 Tanggal : .....  
 Disahkan oleh  
 Dekan  
  
 ( Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum. )  
 Tanggal : 17-10-2018  
 Disetujui oleh:  
 Ka. Prodi Ekonomi Pembangunan  
  
 ( Saimara Selayang, SE., M.Si )

Tanggal : 24-10-2018  
 Disetujui oleh :  
 Dosen Pembimbing I :  
  
 ( Dr. S. H. Kasim Sisyó, M.Si. Ph.D )  
 Tanggal : 17-10-2018  
 Disetujui oleh  
 Dosen Pembimbing II :  
  
 ( RULIMA SEMBURAN )

No. Dokumen: FM-LPPM-08-01	Revisi: 02	Tgl. Eff: 20 Des 2015
----------------------------	------------	-----------------------



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jln. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp. (061) 30106060 PO. BOX. 1099 Medan.  
Email : [admin\\_fe@unpab.pancabudi.org](mailto:admin_fe@unpab.pancabudi.org) <http://www.pancabudi.ac.id>

**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

**UNIV / PTS** : Universitas Pembangunan Panca Budi  
**Fakultas** : Sosial Sains  
**Dosen Pembimbing** : Drs H. Kasim Siyo., M. Si. Ph.D  
**Nama Mahasiswa** : Agus Pardomuan Lambok Silalahi  
**Jurusan / Program Studi** : Ekonomi Publik & SDA / Ekonomi Pembangunan  
**No. Stambuk / NPM** : 1515210122  
**Jenjang Pendidikan** : Strata I  
**Judul Skripsi** : Analisis Belanja Daerah Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Produktivitas Tenaga Kerja Di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
	- Uraian teori yg baru	CS	
	- Relevansi yg telah fokus ke kota Medan yang di masalah	CS	
	- Rata-rata masalah masalah dan identifikasi masalah baru seperti - seperti dengan world - globe	CS	
	- Data APBD Medan 2010-2011	CS	
	- dan di cantumkan ke dalam uraian pendahuluan	CS	
19/02/19	- Prinsip Akutal, Faktual, akurat, Reliabel, ..	A	

Medan,  
Diketahui / Disetujui Oleh :  
Dekan

Dr. Surya N...

Dosen Pembimbing I

Drs H. Kasim Siyo., M. Si. Ph.D

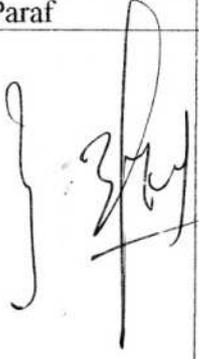


**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jln. Jend. Gatot Subroto Km.4,5 Telp.(061) 30106060 PO.BOX.1099 Medan.  
Email : [admin\\_fe@unpab.pancabudi.org](mailto:admin_fe@unpab.pancabudi.org) <http://www.pancabudi.ac.id>

**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

**UNIV / PTS** : Universitas Pembangunan Panca Budi  
**Fakultas** : Sosial Sains  
**Dosen Pembimbing** : Rahmad Sembiring, SE.,M.SP  
**Nama Mahasiswa** : Agus Pardomuan Lambok Silalahi  
**Jurusan / Program Studi** : Ekonomi Publik & SDA / Ekonomi Pembangunan  
**No. Stambuk / NPM** : 1515210122  
**Jenjang Pendidikan** : Strata I  
**Judul Skripsi** : Analisis Belanja Daerah Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Produktivitas Tenaga Kerja Di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
19-2-19	Tambahkan Daftar pustaka dan tahun <u>2013</u> . Jurumab. → 		

Medan,  
Diketahui / Disetujui Oleh :  
Dekan



Dr. Surya Nita, SH., M.Hum

Dosen Pembimbing I

Rahmad Sembiring, SE.,M.SP



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jln. Jend. Gatot Subroto Km.4,5 Telp.(061) 30106060 PO BOX.1099 Medan.  
Email : [admin\\_fe@unpab.pancabudi.org](mailto:admin_fe@unpab.pancabudi.org) <http://www.pancabudi.ac.id>

**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

**NIV / PTS** : Universitas Pembangunan Panca Budi  
**Fakultas** : Sosial Sains  
**Dosen Pembimbing** : Drs H. Kasim Siyo., M. Si. Ph.D  
**Nama Mahasiswa** : Agus Pardomuan Lambok Silalahi  
**Institusi / Jurusan / Program Studi** : Ekonomi Publik & SDA / Ekonomi Pembangunan  
**No. Stambuk / NPM** : 1515210122  
**jenjang Pendidikan** : Strata I  
**Judul Skripsi** : Analisis Belanja Daerah Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan  
**Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Produktivitas Tenaga Kerja  
 Di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara**

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
	Perbaiki sistematika	<i>[Signature]</i>	
	Perbaiki sesuaikan semua data dengan UMLAS	<i>[Signature]</i>	
	Perbaiki yg belum selesai	<i>[Signature]</i>	
15/03/19	Acc semua proposal	<i>[Signature]</i>	

Medan,  
Diketahui / Disetujui Oleh :  
Dekan



Dr. Surya Nita, SH., M.Hum

Dosen Pembimbing I

Drs H. Kasim Siyo., M. Si. Ph.D



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jln. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp. (061) 30106060 PO.BOX. 1099 Medan.  
 Email : [admin\\_fe@unpab.pancabudi.org](mailto:admin_fe@unpab.pancabudi.org) <http://www.pancabudi.ac.id>

**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

NIV / PTS

Fakultas

Dosen Pembimbing

Nama Mahasiswa

Jurusan / Program Studi

No. Stambuk / NPM

jenjang Pendidikan

Judul Skripsi

Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Produktivitas Tenaga Kerja  
 Di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara

: Universitas Pembangunan Panca Budi

: Sosial Sains

: Rahmad Sembiring, SE., M.SP

: Agus Pardomuan Lambok Silalahi

: Ekonomi Publik & SDA / Ekonomi Pembangunan

: 1515210122

: Strata I

: Analisis Belanja Daerah Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan  
 Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Produktivitas Tenaga Kerja  
 Di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
8/3/2019	<p>standar teori :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sesuai / cari grand theory data</li> <li>- yg mendukung</li> </ul> <p>- tambahi jurnal. Daftar pustaka.</p>	<p>keseluruhan            Pendidikan            Intrastate</p>	<p>Fiskal            SD</p>

Medan,  
 Diketahui / Disetujui Oleh :  
 Dekan



Dosen Pembimbing II

*[Signature]*  
 Rahmad Sembiring, SE., M.SP

*Acc  
 Sempuro*



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jln. Jend. Gatot Subroto Km.4,5 Telp.(061) 30106060 PO.BOX.1099 Medan.  
Email : [admin\\_fe@unpab.pancabudi.org](mailto:admin_fe@unpab.pancabudi.org) <http://www.pancabudi.ac.id>

**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

**NIV / PTS** : Universitas Pembangunan Panca Budi  
**akultas** : Sosial Sains  
**Dosen Pembimbing** : Drs H. Kasim Siyo., M. Si. Ph.D  
**Nama Mahasiswa** : Agus Pardomuan Lambok Silalahi  
**urusan / Program Studi** : Ekonomi Publik & SDA / Ekonomi Pembangunan  
**No. Stambuk / NPM** : 1515210122  
**jenjang Pendidikan** : Strata I  
**Judul Skripsi** : Analisis Belanja Daerah Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan  
**Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Produktivitas Tenaga Kerja**  
**di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara**

tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
	<i>Bertanya sesuai dengan panduan</i>	<i>[Signature]</i>	
	<i>Perbaikan sistematika</i>	<i>[Signature]</i>	
	<i>Perbaikan analisis</i>	<i>[Signature]</i>	
<i>1/19/19</i>	<i>Ace sidang</i>	<i>[Signature]</i>	
<i>26/08/19</i>	<i>Ace sidang lxx</i>	<i>[Signature]</i>	

Medan,  
Diketahui / Disetujui Oleh :  
Dekan

*[Signature]*  
Drs. Surya Nita, SH., M.Hum

Dosen Pembimbing I

*[Signature]*

Drs H. Kasim Siyo., M. Si. Ph.D



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS**

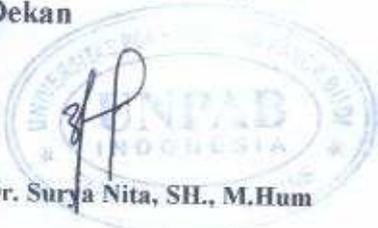
Jln. Jend.Gatot Subroto Km.4,5 Telp.(061) 30106060 PO.BOX.1099 Medan.  
Email : [admin\\_fe@unpab.pancabudi.org](mailto:admin_fe@unpab.pancabudi.org) <http://www.pancabudi.ac.id>

**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

<b>NIV / PTS</b>	: Universitas Pembangunan Panca Budi
<b>akultas</b>	: Sosial Sains
<b>osen Pembimbing</b>	: Rahmad Sembiring, SE.,M.SP
<b>ama Mahasiswa</b>	: Agus Pardomuan Lambok Silalahi
<b>urusan / Program Studi</b>	: Ekonomi Publik & SDA / Ekonomi Pembangunan
<b>o. Stambuk / NPM</b>	: 1515210122
<b>anjang Pendidikan</b>	: Strata I
<b>udul Skripsi</b>	: Analisis Belanja Daerah Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan
<b>nfrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	
<b>di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara</b>	

tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
1 7 2019	<p>① perbaiki awal 23 - 24 - 25</p> <p>② landasan teoritik produktivitas tenaga kerja dikurangi menyemai dan data metapel. (penyerapan tenaga kerja)</p> <p>③ Daftar isi disesuaikan</p>		
Syarat ACC seminar ke-10			

Medan,  
Diketahui / Disetujui Oleh :  
Dekan



Dr. Surya Nita, SH., M.Hum

Dosen Pembimbing II

Rahmad Sembiring, SE.,M.SP

Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:

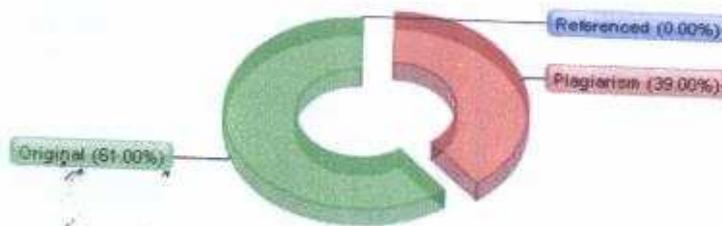
Analyzed document: 04/07/2019 02:22:15

"AGUS PARDOMUAN LAMBOK  
SILALAH\_1515210122\_EKONOMI  
PEMBANGUNAN.docx"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi\_License4



Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

% 26	wrds: 4572	<a href="http://repository.radenintan.ac.id/2261/1/SKRIPSI.pdf">http://repository.radenintan.ac.id/2261/1/SKRIPSI.pdf</a>
% 17	wrds: 2768	<a href="http://eprints.undip.ac.id/51098/1/01_RAHMADIAN.pdf">http://eprints.undip.ac.id/51098/1/01_RAHMADIAN.pdf</a>
% 16	wrds: 2621	<a href="https://ejournal.unsraf.ac.id/index.php/bie/article/viewFile/8698/9250">https://ejournal.unsraf.ac.id/index.php/bie/article/viewFile/8698/9250</a>

Show other Sources:]

Processed resources details:

203 - Ok / 33 - Failed

Show other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:



Wiki Detected!

Google Books:



[not detected]

Ghostwriting services:



[not detected]

Anti-cheating:



[not detected]

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh dana belanja daerah sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap indeks pembangunan manusia. Penelitian ini menggunakan alat analisis jalur (*Path Analysis*) dan data runtut waktu (*time series*) pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 yang diolah dengan aplikasi SPSS 16. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan kuantitatif. Setelah melakukan analisis hasil pertama menunjukkan bahwa besarnya pengaruh langsung Belanja Daerah Sektor Pendidikan (X1) sebesar -0,135 lebih kecil dari nilai pengaruh tidak langsung sebesar -0,384, artinya bahwa Sektor Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas Tenaga Kerja dan Indeks Pembangunan Manusia di Kota Medan. Hasil analisis kedua menunjukkan bahwa pengaruh langsung Belanja Daerah Sektor Kesehatan (X2) sebesar 0,341 lebih kecil dari nilai pengaruh tidak langsung sebesar 0,606, artinya bahwa Sektor Kesehatan berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas Tenaga Kerja dan Indeks Pembangunan Manusia di Kota Medan. Hasil ketiga menunjukkan bahwa pengaruh langsung Belanja Daerah Sektor Infrastruktur (X3) sebesar 0,125 lebih besar dari nilai pengaruh tidak langsung sebesar -0,056, artinya bahwa Sektor Infrastruktur tidak berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas Tenaga Kerja dan Indeks Pembangunan Manusia sebagai di Kota Medan.

Kata Kunci : Belanja Daerah Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan, Sektor Infrastruktur, Produktivitas Tenaga Kerja dan Indeks Pembangunan Manusia

## **ABSTRACT**

*This study aims to analyze and find out the effect of regional spending on the education, health and infrastructure sectors on the human development index. This research uses path analysis and time series data from 2010 to 2017 which are processed using SPSS 16. This research uses descriptive and quantitative analysis methods. After conducting the first results analysis shows that the magnitude of the direct effect of Regional Education Sector Expenditures (X1) of -0.135 is smaller than the value of indirect influence of -0.384, meaning that the Education Sector has a significant effect on Labor Productivity and Human Development Index in Medan City. The results of the second analysis indicate that the direct effect of Regional Health Sector Expenditures (X2) of 0.341 is smaller than the value of indirect influence of 0.606, meaning that the Health Sector has a significant effect on Labor Productivity and Human Development Index in Medan City. The third result shows that the direct effect of Regional Infrastructure Expenditure (X3) of 0.125 is greater than the value of the indirect effect of -0.056, meaning that the Infrastructure Sector has no significant effect on Labor Productivity and Human Development Index as in Medan City.*

*Keywords: Regional Expenditure in the Education Sector, Health Sector, Infrastructure Sector, Labor Productivity and Human Development Index*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMANAN PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACK</b> .....	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vii</b>
<b>LEMBARAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	15
C. Rumusan Masalah .....	16
D. Tujuan Penelitian.....	17
E. Manfaat Penelitian .....	18
F. Keaslian Penelitian.....	19

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

A. Landasan Teori .....	21
1. Pengertian Produktivitas Tenaga Kerja.....	21
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Tenaga Kerja.....	22
3. Aspek-Aspek Produktivitas Tenaga Kerja .....	23
4. Penyerapan Tenaga Kerja .....	24
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	25
6. Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia.....	28
7. Teori Pertumbuhan Ekonomi .....	29
8. Belanja Daerah .....	32
9. Pembangunan Manusia .....	34
10. Pengaruh Belanja Daerah Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Produktivitas Tenaga kerja.....	36
11. Pengaruh Belanja Daerah Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Produktivitas Tenaga Kerja.....	39
12. Pengaruh Belanja Daerah Sektor Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Produktivitas Tenaga Kerja.....	42
B. Penelitian Terdahulu.....	45
C. Kerangka Konseptual .....	53
D. Hipotesis .....	53

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Pendekatan Penelitian .....	55
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	55
C. Definisi Operasional Variabel .....	56
D. Populasi dan Sampel .....	57
E. Jenis dan Sumber Data.....	58
F. Teknik Pengumpulan Data.....	58
G. Metode Analisis Data .....	58

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....**

A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	61
1. Sejarah Kota Medan Sumatera Utara .....	61
2. Letak Geografis .....	64
3. Keadaan Alam dan penduduk Kota Medan .....	67
4. Sarana dan Prasarana .....	70
a. Fasilitas Pendidikan .....	70
b. Fasilitas Kesehatan .....	70
c. Fasilitas Infrastruktur .....	71
B. Gambaran Hasil Penelitian .....	73
1. Pengeluaran Pemerintah .....	74
2. Belanja Pemerintah Daerah Sektor Pendidikan .....	75
3. Belanja Pemerintah Daerah Sektor Kesehatan .....	76
4. Belanja Pemerintah Daerah Sektor Infrastruktur .....	77
C. Hasil Analisis Data .....	78
1. Hasil Pengujian Asumsi Klasik .....	78
a. Uji Normalitas Data .....	78
b. Uji Multikolinieritas Data .....	79
c. Uji Autokorelasi Data .....	80
2. Hasil Analisis Path Analysis .....	81
D. Interpretasi Hasil Path Analysis .....	86
1. Pengaruh Belanja Daerah Sektor Pendidikan Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Melalui Indeks Pembangunan Manusia Sebagai Variabel Intervening .....	86
2. Pengaruh Belanja Daerah Sektor Kesehatan Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Melalui Indeks Pembangunan Manusia Sebagai Variabel Intervening .....	87
3. Pengaruh Belanja Daerah Sektor Kesehatan Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Melalui Indeks Pembangunan Manusia Sebagai Variabel Intervening .....	89
E. Pembahasan .....	90
1. Pengaruh Belanja Daerah Sektor Pendidikan Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Melalui Indeks Pembangunan Manusia Sebagai Variabel Intervening .....	90
2. Pengaruh Belanja Daerah Sektor Kesehatan Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Melalui Indeks Pembangunan Manusia Sebagai Variabel Intervening .....	92
3. Pengaruh Belanja Daerah Sektor Infrastruktur Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Melalui	

Indeks Pembangunan Manusia Sebagai Variabel Intervening .....	94
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	96
A. Kesimpulan .....	96
B. Saran .....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan kasih karunianya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang di susun guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan tugas akhir untuk dapat mencapai gelar sarjana pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Adapun judul yang penulis sajikan adalah sebagai berikut : **”Analisis Belanja Daerah sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Produktivitas Tenaga Kerja di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara”**.

Dalam kesempatan ini, penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Dr. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak Saimara Sebayang, SE., M.Si, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak Drs H. Kasim Siyo., M.Si. Ph.D, selaku dosen pembimbing I penulis yang sudah banyak memberikan arahan, motivasi serta kemudahan dalam proses penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Rahmad Sembiring, SE., M.SP, selaku dosen pembimbing II penulis yang sudah memberikan banyak saran, masukan, motivasi, serta kemudahan di dalam pembuatan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu dosen yang telah mengajarkan ilmunya selama perkuliahan di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Seluruh Staff pegawai departemen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
8. Kepada kedua orang tua saya dengan Ayahanda M.O Silalahi dan Ibunda Nursia br. Torus yang selalu memberikan semangat dan doa serta pengorbanan moril, materil yang tidak dapat dinilai dengan apapun.
9. Serta kepada seluruh teman-teman yang telah memberikan semangat dan motivasi-motivasi dalam perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dengan segala kekurangannya. Untuk itu dengan penuh kerendahan hati mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan ilmu ataupun wawasan bagi mahasiswa Universitas Pembangunan Pancabudi dan semoga skripsi ini membawa manfaat dan berguna bagi pembacanya.

Medan, Agustus 2019

Penulis

AGUS PARDOMUAN LAMBOK SILALAH  
NIM. 1515210122

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kata produktivitas pertama kali dicetuskan oleh Quesnay pada tahun 1766. Pada tahun 1883, Littre mendefinisikan produktivitas sebagai “kemampuan untuk memproduksi”. Produktivitas berasal dari kata produksi, kata produksi sering digunakan dalam istilah membuat sesuatu. Produksi adalah mengubah bahan dari sumber-sumber menjadi yang diinginkan oleh konsumen. Hal tersebut bisa berupa barang atau jasa. Produktivitas adalah perbandingan antara output (hasil) dengan input (masukan). Produktivitas (*productivity*) merupakan sebagai meningkatnya hasil kerja yang dipengaruhi oleh kemampuan para karyawan (input) dan menghasilkan sebuah barang atau jasa (ouput).

Produktivitas kerja adalah sesuatu yang sering di pergunakan dalam perencanaan pengembangan suatu industri dan perencanaan pengembangan ekonomi nasional. Bahkan kata produktivitas tidak hanya membahas dalam perencanaan dan kegiatan ekonomi, tetapi juga membahas dibidang lain, seperti dibidang pendidikan, bidang kesehatan dan dibidang lainnya. Produktivitas tenaga kerja adalah kemampuan tenaga kerja yang menghasilkan barang produksi dan seorang tenaga kerja dapat di katakan mampu atau produktif apabila menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan di harapkan dalam waktu yang tepat.

Tenaga kerja adalah salah satu faktor produksi yang memegang peranan suatu kegiatan ekonomi. Tinggi rendahnya kualitas tenaga kerja akan

mempengaruhi kualitas perekonomian suatu negara atau daerah, khususnya produktivitas dari output yang dihasilkannya. Produktivitas suatu daerah bisa dilihat dari keadaan nilai produksi daerah yang tercermin dalam nilai PDRB dengan jumlah tenaga kerja yang bekerja sesuai dengan lapangan usaha yang ada di daerah yang bersangkutan. Persoalan pokok ketenagakerjaan bersumber dari kurangnya daya saing tenaga kerja terhadap laju pertumbuhan tenaga kerja. Persoalan ini sesungguhnya tidaklah berdiri sendiri tetapi merupakan mata rantai yang saling terkait dalam proses pembangunan nasional secara keseluruhan. Jika hendak mengusutnya maka pada awalnya pertumbuhan penduduk, menyusul masalah pendidikan, selanjutnya masalah pertumbuhan ekonomi dan akhirnya berdampak pada pertumbuhan kesempatan kerja dan angkatan kerja.

Masalah yang muncul dari sumber daya manusia adalah masalah produktivitas tenaga kerja. Semakin meningkat jumlah penduduk yang berada dalam suatu negara atau daerah belum tentu akan menjadi modal pembangunan, akan tetapi mungkin saja justru menjadi beban atau tanggungan penduduk setempat, sebab tidak semua penduduk mempunyai kemampuan untuk memproduksi.

Umumnya masalah produktivitas tenaga kerja tidak terlepas dari masalah pertumbuhan penduduk. Negara Indonesia yang mempunyai laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi tentunya memerlukan lapangan kerja yang banyak. Tapi dalam kenyataannya lapangan kerja yang tersedia belum mampu menampung jumlah tenaga kerja yang tersedia. Oleh karena itu, potensi atau kemampuan tenaga kerja sangat perlu dikembangkan lagi supaya pemanfaatannya semakin maju dan meningkat.

Kota Medan yang merupakan salah satu wilayah yang cukup potensial memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Potensi inilah yang akan dikembangkan dengan baik dari segi modal maupun ketenagakerjaan. Kota Medan juga merupakan pusatnya ekonomi, sosial dan perdagangan bagi kota-kota lain yang berada disekitarnya, sehingga banyak penduduk dari kota-kota lain yang berada disekitarnya yang termotivasi untuk datang dan mencari pekerjaan yang lebih baik.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari IPM. Indeks Pembangunan Manusia dapat mengukur perkembangan manusia secara terukur dan representatif. IPM dapat juga diartikan bagaimana masyarakat atau penduduk dapat mengakses pembangunan dalam menerima pendapatan, kesehatan, pendidikan, jalan infrastruktur dan sebagainya.

Indeks Pembangunan Manusia dapat diukur dengan tiga dimensi yaitu umur panjang, kesehatan, dan penghasilan individu untuk mendukung hidup layak dan juga diarahkan oleh harapan hidup ketika lahir, maka dirumuskan menjadi Indeks Angka Harapan Hidup, tolak ukur ilmu pengetahuan yaitu dengan tingkat baca tulis dan rata-rata lama sekolah membentuk Indeks Pendidikan dan standar hidup layak ditunjukkan oleh pengeluaran riil perkapita yang dibakukan dalam Indeks Pendapatan.

Dalam persoalan-persoalan mengenai tingkat pembangunan manusia telah menjadi perhatian khusus kepada pemerintahan setempat. Berbagai isu dalam

ukuran pembangunan manusia dibuat namun nyatanya tidak semuanya dapat dipergunakan sebagai ukuran standar yang bisa dibandingkan antar daerah atau wilayah. Dari masa ke masa perhatian pemerintah terhadap penyajian pembangunan sumber daya manusia atau Indeks Pembangunan Manusia seringkali muncul polemik dan kegaduan, namun semua pihak sepakat bahwa pembangunan sumber daya manusia sangat penting dan suatu keberhasilan pembangunan suatu daerah/wilayah pada berbagai bidang yang terutama bagi kesejahteraan rakyat. Dengan demikian Indeks Pembangunan Manusia menjadikan tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi, sosial dan di bidang lain-lainnya. Maka dari itu peningkatan SDM merupakan suatu keharusan yang menjadi bertanggung jawab pemerintah, tetapi semua pihak masyarakat penduduk secara kelompok berkepentingan lainnya. Peningkatan suatu kualitas SDM perlu adanya upaya sistematis sehingga terintegrasikan dalam semua aspek kehidupan seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, politik, budaya dan kehidupan sosial lainnya.

Meningkatnya nilai IPM menunjukkan bahwa terjadi peningkatan sumber daya manusia yang sangat berkualitas pada suatu daerah. Sumber daya manusia menjadi subjek dan objek pembangunan, hal ini menjadikan bahwa manusia selain sebagai pelaku dari pembangunan juga merupakan sasaran pembangunan. Dengan demikian, peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan unsur pembangunan yang sangat penting sekali. Menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dibutuhkan berbagai sarana dan prasarana, oleh karena itu dibutuhkan suatu kebijakan yang sangat menjanjikan yaitu berinvestasi.

Investasi pada manusia ini untuk dapat menciptakan pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas, seperti investasi di sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Aspek pendidikan, kesehatan dan infrastruktur merupakan tujuan pembangunan yang sangat mendasar di suatu daerah atau di wilayah. Untuk mendukung aspek pendidikan, kesehatan dan infrastruktur tidak lepas dari membutuhkan anggaran. Oleh karena itu, dukungan pemerintah daerah dibutuhkan dalam menjalankan aspek pendidikan, kesehatan dan infrastruktur melalui pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah salah satu cara untuk membangun suatu daerah atau wilayah. Pengeluaran pemerintah digunakan sebagai untuk membiayai sektor-sektor publik yang penting diantaranya sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Perkembangan pembangunan Kota Medan yang sangat pesat dan maju akan menyebabkan semakin berkembang pada laju perekonomian di segala bidang. Kota Medan sebagai kota Metropolitan telah berupaya dalam memacu laju pertumbuhan pembangunan yang merata dan mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Medan yang pesat. Hal ini dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi Kota Medan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan relatif signifikan, dapat dilihat dai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan tahun 2010 hingga 2017 pada tabel dibawah berikut.

**Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah Kota Medan  
Tahun 2010-2017 (Dalam Rupiah)**

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah Kota Medan
1	2010	588.941.453.691,54
2	2011	995.072.572.141,34
3	2012	1.147.901.461.607,38
4	2013	1.206.169.709.147,73
5	2014	1.348.246.114.729,62
6	2015	1.489.723.189.088,60
7	2016	1.535.259.539.056,01
8	2017	1.739.756.922.633,50

*Sumber: pengelola keuangan dan aset daerah Kota Medan*

Dari tabel di atas terlihat bahwa PAD Kota Medan dari tahun 2010 sebesar Rp 588.941.453.691,54, jika dibandingkan dengan tahun 2017 PAD Kota Medan mengalami peningkatan yang sangat tinggi yaitu sebesar Rp 1.739.756.922.633,50. Dari PAD tersebut pemerintah Kota Medan harus optimal menggunakan hasil pendapatan daerah agar dalam pembangunan daerah yang maju dan juga berdampak kepada masyarakat supaya masyarakat penduduk sejahtera adil dan makmur. Pembangunan manusia tidak terlepas dengan dari peran pemerintah daerah dalam pembangunan, sebab manusia perlu modal utama dalam pembangunan suatu daerah. kebijakan adanya APBD sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah daerah setelah berlakunya desentralisasi fiskal, hal ini bertujuan supaya pemerintah daerah dapat membangun daerah yang secara optimal. Untuk mengetahui APBD Kota Medan dapat dilihat pada tabel 1.2.

**Tabel 1.2 APBD Kota Medan Tahun 2010-2017 (Dalam Rupiah)**

No	Tahun Anggaran	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
1	2010	2.582.065.326.653,00	2.235.195.758.724,49
2	2011	3.395.728.853.449,00	3.041.037.853.628,40
3	2012	4.080.935.662.619,00	3.021.172.391.041,67
4	2013	4.237.560.638.891,00	3.224.449.048.408,88
5	2014	4.625.169.942.881,00	3.723.643.299.085,60
6	2015	5.467.952.757.114,00	4.374.968.274.136,94
7	2016	5.737.738.289.895,00	4.525.231.330.995,15
8	2017	5.554.084.308.979,40	4.395.825.169.224,53

*Sumber: pengelola keuangan dan aset daerah Kota Medan*

Dari tabel di atas terlihat bahwa APBD Kota Medan dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2010 anggaran belanjanya sebesar Rp 2.582.065.326.653,00 dan terealisasi hanya sebesar Rp 2.235.195.758.724,49. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu anggaran belanjanya sebesar Rp 5.554.084.308.979,40 yang terealisasi hanya sebesar Rp 4.395.825.169.224,53. Adanya APBD yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Medan agar anggarannya digunakan pembangunan yang betul-betul membangun untuk masyarakat supaya masyarakat merasakannya dalam pembangunan yang ada.

Pemerintah melakukan pengeluaran atau investasi yang ditujukan pada pembangunan manusia yang baik seperti bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pembentukan modal manusia yang akan berdampak pada pembangunan di suatu

daerah. anggaran tersebut didanai oleh pemerintah yang menjadikan pengeluaran bagi pemerintah. Anggaran yang dialokasikan untuk suatu bidang menunjukkan komitmen pemerintah terhadap permasalahan bidang yang ditentukan. Maka dari itu untuk mengetahui perkembangan realisasi anggaran belanja daerah Kota Medan pada Tabel 1.3 di bawah berikut:

**Tabel 1.3 Realisasi Belanja Daerah Sektor Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur (Dalam Rupiah), Indeks Pembangunan Manusia dan Produktivitas Tenaga Kerja Kota Medan Tahun 2010-2017**

Tahun	Sektor Pendidikan (Rp)	Sektor Kesehatan (Rp)	Sektor Infrastruktur (Rp)	IPM (%)	Produktivitas Tenaga Kerja (Jumlah Orang)
2010	733.266.652.917,00	294.671.898.434,58	894.447.095.338,91	77.02	78.278
2011	983.774.581.356,00	373.568.879.990,22	1.276.292.315.813,11	77.54	82.935
2012	983.289.538.550,00	423.878.270.895,25	1.210.637.409.110,42	77.78	99.440
2013	1.109.133.107.469,00	389.133.311.196,48	1.239.130.487.061,16	78	117.502
2014	1.079.853.934.544,00	495.610.513.080,28	1.162.369.583.640,77	78.26	148.296
2015	1.162.361.929.743,00	627.008.258.405,00	1.941.167.065.109,17	78.87	204.379
2016	1.195.515.428.591,00	691.863.259.661,01	1.973.444.225.304,52	79.34	214.250
2017	883.069.743.930,00	615.211.142.256,00	2.206.708.786.843,31	79.98	238.455

*Sumber: pengelola keuangan dan aset daerah Kota Medan, BPS dan Dinasker*

Dari tabel diatas memperlihatkan bahwa perkembangan realisasi pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dalam belanja daerah dan realisasi anggaran belanja daerah di Kota Medan Tahun 2010 hingga 2017. Bisa dilihat dari realisasi pengeluaran pemerintah Kota Medan di sektor pendidikan selalu meningkat dari tahun 2010 sampai 2016 dan hanya tahun 2017 realisasi anggaran belanja pemerintah Kota Medan menurun. Realisasi pengeluaran belanja pemerintah Kota Medan di sektor pendidikan dari tahun 2010 sampai 2012 meningkat yang signifikan tetapi tahun berikutnya yaitu 2013 mengalami penurunan yang sangat dalam kemudian tahun berikutnya juga dari tahun 2014 hingga 2017 mengalami peningkatan kembali yang sangat signifikan juga.

Realisasi pengeluaran belanja pemerintah Kota Medan di sektor infrastruktur dari tahun 2010 sampai 2017 selalu mengalami peningkatan yang signifikan.

Adanya pengeluaran pemerintah dari sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur di Kota Medan merupakan upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia yang baik. Maka dari itu diharapkan akan berdampak baik dan positif bagi indeks pembangunan manusia dan produktivitas tenaga kerja di Kota Medan. Investasi dalam bidang pendidikan sangat mutlak dibutuhkan maka pemerintah memang harus fokus dalam membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik pada masyarakat. Pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan merupakan tindakan nyata dari investasi supaya untuk meningkatkan produktivitas penduduk masyarakat.

Pengeluaran pemerintah terhadap kesehatan di harapkan mampu membentuk modal manusia yang merupakan menjadi tonggak penting dalam membangun suatu daerah yang baik dan maju. Begitu juga pengeluaran pemerintah terhadap infrastruktur di harapkan memajukan perekonomian suatu daerah dan meningkatkan produktivitas masyarakatnya. Sedangkan dilihat dari tabel diatas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota medan dari tahun 2010 sampai 2017 selalu mengalami peningkatan yang signifikan, artinya IPM Kota Medan keadaan yang baik. Dan kemudian jumlah tenaga kerja di Kota Medan dari tahun 2010 hingga tahun 2017 selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan IPM salah satunya ditentukan oleh alokasi pengeluaran pemerintah daerah yang dikelola dengan baik agar bermanfaat bagi seluruh masyarakat penduduk seperti halnya dibidang sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, pelatihan, proses, cara dan perbuatan mendidik. Pendidikan merupakan suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan sarana pembelajaran dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Yang dimaksud tingkat pendidikan dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan formal yang dimiliki oleh tiap-tiap anggota keluarga di masyarakat kota medan.

Pendidikan ini melingkupi proses pendidikan yang dilaksanakan di sekolah. Umumnya dalam masyarakat kota medan memiliki tingkat pendidikan yang bervariasi dan ada pula yang sama. Tingkat pendidikan dikategorikan ke dalam beberapa tingkatan yang meliputi 3 macam yaitu tingkat pendidikan rendah (tamat SD,SMP), tingkat pendidikan menengah (tamat SMA/SMK), dan tingkat pendidikan tinggi (tamat perguruan tinggi).

Dalam bidang pendidikan, bahwa pendidikan salah satu pilar yang menjadi kemajuan suatu negara. Pada tahun 2002 adanya amandemen UUD 1945 keempat tentang pendidikan, pasal 31 berbunyi:

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan

serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan manusia yang diatur dalam undang-undang.

4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan nasional.

Menurut Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional yang disahkan oleh DPR pada tahun 2003 pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib terjamin tersedianya anggaran guna penyelenggaraan pendidikan bagi setiap warga yang berusia tujuh sampai lima belas tahun. Hal ini dicantumkan dalam Program Pendidikan 9 tahun yang mana Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan SD sampai SMP dengan cara membuat biaya pendidikan semurah-murahnya. Dari pernyataan Undang-Undang tersebut adalah Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai pada tahun 2005. Program BOS ini diharapkan bisa membantu para siswa yang tidak mampu dan bisa melanjutkan pendidikannya yang terkendala dengan baik agar juga meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten sehingga mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di daerah tersebut.

Pendidikan dan kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Berdasarkan perspektif ekonomi, sisi pentingnya mengenai faktor pendidikan dan kesehatan akan berkaitan dengan sumber daya manusia itu sendiri. Tinggi rendahnya kualitas sumber daya manusianya ditentukan oleh status pendidikan, kesehatan dan banyaknya dibangun infrastruktur. Dalam kegiatan ekonomi, ketiga indikator kualitas sumber daya manusia tersebut khususnya produktivitas tenaga kerja.

Kesehatan adalah suatu kondisi yang sejahtera dan sehat dari fisik, batin maupun jiwa yang membuat manusia atau seseorang melakukan suatu kegiatan dan akan menghasilkan produktivitas dari kesehatan tersebut. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan dan kesehatan juga menjadi fundamental untuk membentuk manusia yang lebih baik pada pembangunan kesehatan yang baik juga. Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2009 pasal 171 menyatakan bahwa menjadikan alokasi belanja di bidang kesehatan mutlak di penuhi (*mandatory spending*). Pasal tersebut menyatakan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar 5% dari APBN diluar gaji, sementara Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran Kesehatan sebesar 10% dari APBN diluar gaji.

Tujuan pembangunan bidang kesehatan adalah tercapainya derajat kesehatan yang harus terus-menerus membaik. Penggunaan anggaran dibidang kesehatan tersebut harus seoptimal mungkin dapat dimanfaatkan bagi penggunaanya dan tujuan tersebut tercapai dengan baik. Proporsi belanja kesehatan publik terhadap total belanja kesehatan di Indonesia dalam empat tahun terakhir, secara rata-rata hanya tercapai sekitar 46% dari total belanja kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa peran dari pemerintah pusat dan daerah dalam tujuan pembangunan kesehatan perlu dioptimalkan lagi.

Menurut lembaga WHO, kesehatan merupakan keadaan baik sepenuhnya secara fisik, mental, sosial. Kesehatan juga bukanlah karena tidak ada penyakit atau kelemahan dan bukan pula sekedar soal medis semata, melainkan menyangkut keadaan sosial di masyarakat. Pengertian sehat menurut UU Pokok Kesehatan No. 9 tahun 1960, Bab I Pasal 2 adalah keadaan yang meliputi

kesehatan badan (jasmani), rohani (mental), dan sosial, serta bukan hanya keadaan bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan. Batasan kesehatan tersebut di atas sekarang telah diperbaharui bila batasan kesehatan yang terdahulu itu hanya mencakup tiga dimensi atau aspek, yakni: fisik, mental, dan sosial, maka dalam Undang- Undang NO. 23 Tahun 1992, kesehatan mencakup aspek, yakni: fisik (badan), mental (jiwa), sosial, dan ekonomi. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Pemerintah Daerah (Dinas Kesehatan & RSUD) dan swasta dalam Pelayanan Kesehatan serta luas wilayah kota medan yang relatif mudah dijangkau dengan kendaraan memberikan kemudahan kepada setiap penduduk di kota Medan dan sekitarnya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Peran aktif dari pihak masyarakat dan swasta dalam pemberian pelayanan kesehatan di kota Medan menjadikan kota Medan sebagai pusat jasa kesehatan dan merupakan andalan dari Pemerintah kota Medan di samping jasa pendidikan dan perdagangan. Perizinan dan pembinaan sarana pelayanan kesehatan dari Dinas Kesehatan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta dan pemerintah baik Polri dilakukan secara berkala dengan konsep kemitraan pelayanan kesehatan.

Infrastruktur merupakan salah satu sarana yang harus disediakan oleh pemerintah agar terlaksananya suatu pembangunan yang baik. Sarana yang dimaksud adalah adanya terbentuk berbagai macam bidang seperti transportasi, komunikasi dan perhubungan, air bersih, listrik, dan sebagainya. Pembangunan manusia yang baik tidak lepas dari ketersediaan infrastruktur dalam untuk meningkatkan investasi pada sumber daya manusia yang tidak asing lagi dengan

perbaikan dalam pembangunan kualitas modal manusia itu sendiri. Ada beberapa alasan utama mengapa infrastruktur sangat penting untuk membangun sebuah integrasi ekonomi, antara lain sebagai berikut:

1. Ketersediaan infrastruktur merupakan faktor utama dalam pembangunan ekonomi disuatu daerah.
2. Memperoleh manfaat yang banyak dari integrasi sebuah ekonomi, ketersediaan jaringan infrastruktur sangatlah penting untuk memperlancar aktivitas perdagangan dan sebuah investasi.
3. Harus memperhatikan perbaikan infrastruktur juga sangat penting dalam mengatasi kesenjangan pembangunan ekonomi antar negara, provinsi maupun antar suatu daerah.

Simon Kuznet menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan *public service obligation*, yaitu sesuatu yang harus menjadi kewajiban oleh pemerintah karena infrastruktur adalah bagian prasarana publik dan juga akan mendukung kegiatan ekonomi suatu negara. Adanya ketersediaan infrastruktur ini yang dibuat oleh pemerintah sangat penting untuk menentukan tingkat keefisienan dan keefektifan dalam kegiatan ekonomi atau roda perekonomiannya berjalan dengan baik serta akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan produktivitas. Pembangunan infrastruktur di Kota Medan tidak akan berjalan tanpa adanya dengan kualitas yang handal dari sumber daya aparturnya.

Pembangunan Infrastruktur Kota Medan belum berjalan dengan maksimal seperti diantaranya infrastruktur berupa jalan, jembatan, drainase dan termasuk pelayanan publik. Infrastruktur merupakan roda penggerak suatu pertumbuhan ekonomi. pembangunan infrastruktur terdapat dua bagian yaitu infrastruktur

ekonomi dan infrastruktur sosial. Infrastruktur ekonomi merupakan infrastruktur fisik baik yang digunakan dalam proses produksi maupun yang dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti meliputi prasarana umum yaitu telekomunikasi dan perhubungan, irigasi, air bersih, listrik, sanitasi dan serta pembuangan limbah. Infrastruktur sosial merupakan prasarana hanya meliputi kesehatan dan pendidikan. Dari segi infrastruktur sangat penting dalam suatu daerah. jika infrastruktur dibangun dengan baik maka perekonomian suatu daerah jalan dengan lancar, sebagaimana kehadiran infrastruktur ini dapat meningkatkan konektivitas sehingga memperlancar distribusi dan menurunkan biaya logistik barang dan jasa. Berdasarkan hal diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai **”Analisis Belanja Daerah Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Produktivitas Tenaga Kerja Di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara”**.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, adapun identifikasi masalah yang di tarik, yaitu sebagai berikut:

- a. Belanja daerah sektor Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Medan dari tahun 2010 sampai 2017.
- b. Belanja daerah sektor Kesehatan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Medan dari tahun 2010 sampai 2017.

- c. Belanja daerah sektor Infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Medan dari tahun 2010 sampai 2017.
- d. Belanja daerah sektor Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas Tenaga Kerja di Kota Medan dari tahun 2010 sampai 2017.
- e. Belanja daerah sektor Kesehatan berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas Tenaga Kerja di Kota Medan dari tahun 2010 sampai 2017.
- f. Belanja daerah sektor Infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas Tenaga Kerja di Kota Medan dari tahun 2010 sampai 2017.

## **2. Batasan Masalah**

Untuk mencegah mengembangnya permasalahan maka penulis membatasi masalah untuk lebih terperinci dan jelas sehingga pemecahannya terarah dan berhasil. Penulis membatasi menganalisis belanja daerah sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastuktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Produktivitas Tenaga Kerja Di Kota Medan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2017.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang diatas, maka terdapat rumusan masalah yang dapat diambil sebagai kajian dalam penelitian yang akan dilakukan.

Hal ini bertujuan untuk mempermudah data penulisan proposal ini. Selain itu, rumusan masalah ini diperlukan sebagai suatu cara untuk mengambil suatu keputusan dari penulisan penelitian. Maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Apakah belanja daerah sektor Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Medan ?
2. Apakah belanja daerah sektor Kesehatan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Medan ?
3. Apakah belanja daerah sektor Infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Medan ?
4. Apakah belanja daerah sektor Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas Tenaga Kerja di Kota Medan ?
5. Apakah belanja daerah sektor Kesehatan berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas Tenaga Kerja di Kota Medan ?
6. Apakah belanja daerah sektor Infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas Tenaga Kerja di Kota Medan ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka tujuan dari penelitian diatas adalah :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh belanja daerah sektor Pendidikan terhadap Indeks pembangunan di kota Medan.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh belanja daerah sektor Kesehatan terhadap Indeks pembangunan di kota Medan.

3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh belanja daerah sektor Infrastruktur terhadap Indeks pembangunan di kota Medan.
4. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh belanja daerah sektor Pendidikan terhadap Produktivitas tenaga kerja di kota Medan.
5. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh belanja daerah sektor Kesehatan terhadap Produktivitas tenaga kerja di kota Medan.
6. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh belanja daerah sektor Infrastruktur terhadap Produktivitas tenaga kerja di kota Medan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini mengenai belanja daerah dalam suatu daerah adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Kota Medan dalam memahami bagaimana belanja daerah sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur mempengaruhi IPM dan Produktivitas Tenaga Kerja.
2. Sebagai tambahan referensi dalam penelitian lanjutan yang disesuaikan dengan bidangnya.
3. Sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan kepada akademisi mengenai Analisis belanja daerah sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Produktivitas Tenaga Kerja Di Kota Medan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2017.

## **F. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini di dapat dari penelitian Rino Karno Sihombing (2017). Universitas Jambi, dalam penelitian ini mengenai “Pengaruh Belanja Daerah Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Produktivitas Tenaga Kerja” (Studi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi). Penelitian ini menggunakan data Primer. Data primer adalah data yang harus turun kelapangan ke daerah tersebut, dengan menggunakan metode Deskriptif Kuantitatif dan Path Analysis.

Hasil analisis menunjukkan bahwa sektor belanja pendidikan dan belanja kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, hanya variabel belanja infrastruktur yang secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Kemudian sektor belanja pendidikan dan belanja infrastruktur berpengaruh signifikan secara langsung terhadap Produktivitas Tenaga Kerja, sedangkan belanja kesehatan dan Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh signifikan. Karena variabel Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh signifikan maka di simpulkan bahwa variabel belanja pendidikan, kesehatan dan infrastruktur tidak memiliki pengaruh tidak langsung melalui Indeks Pembangunan Manusia terhadap Produktivitas Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

**Tabel 1.4 Originalitas Penelitian**

<b>No</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Peneliti Terdahulu</b>	<b>Peneliti Sekarang</b>
1	Lokasi Penelitian	Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi	Kota Medan
2	Tahun Penelitian	2017	2019
3	Data Penelitian	2011-2016	2010-2017
4	Metode Penelitian	Path Analysis	Path Analysis

Berdasarkan perbedaan lokasi penelitian, tahun penelitian, data penelitian dan metode penelitian yang digunakan menjadi perbedaan yang membuat keaslian penelitian ini di buat pasti dengan baik. Dengan demikian, fokus utama adalah dilakukan terhadap bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur sehingga dapat memberikan gambaran secara baik dan mendalam.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pengertian Produktivitas Tenaga Kerja**

Produktivitas mengandung pengertian filosofis, definisi kerja dan teknis operasional. Secara filosofis, produktivitas mengandung pandangan hidup dan sikap mental yang selalu berusaha untuk meningkatkan mutu kehidupan, keadaan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan mutu kehidupan besok harus lebih baik dari hari ini. Menurut Siagian dan Agustin (2014) produktivitas kerja merupakan kemampuan yang menghasilkan barang/jasa dari berbagai sumber daya dan kemampuan yang dimiliki oleh para pekerja.

Secara umum, produktivitas dapat diartikan sebagai kemampuan yang meningkatkan hasil pekerja yang ditinjau dari sumber daya yang dimiliki setiap masing-masing pekerja. Pandangan hidup kita dan sikap mental yang akan mendorong manusia untuk tidak cepat merasa cukup dan puas, akan tetapi terus mengembangkan diri, berlatih dan meningkatkan kemampuan kerja. Produktivitas pada dasarnya merupakan efektivitas faktor input dalam menghasilkan output. Banyak pengukuran produktivitas yang diketahui, produktivitas lahan, tenaga kerja, modal dan lain-lain. produktivitas faktor produksi yang selalu dipakai dalam proses produksi. Namun demikian ada satu pengukuran produktivitas yang sangat menarik untuk diperhatikan yaitu *output/labour* yang disebabkan dalam pengertian ini telah terkandung kombinasi dari kualitas tenaga kerja. Misalnya pendidikan, keahlian, teknis, motivasi, kapital dan teknologi.

Produktivitas dapat diartikan secara sederhana dengan peningkatan kualitas dan kuantitas, bisa juga diartikan bekerja secara efektif dan efisien. Karena itu antara produktivitas, efektif, efisien, dan kualitas sangat berdekatan. Artinya sumber-sumber ekonomi yang digerakkan secara efektif memerlukan keterampilan dan teknis sehingga mempunyai tingkat hasil guna yang tinggi. Produktivitas tenaga kerja memegang peranan penting dalam proses pertumbuhan ekonomi suatu bangsa, karena pendapatan nasional maupun pendapatan daerah banyak diperoleh dengan cara meningkatkan keefektifan dan mutu tenaga kerja dibandingkan dengan melalui formasi modal dan penambahan angkatan kerja. Pembinaan yang baik terhadap penduduk maupun angkatan kerja akan menghasilkan mutu angkatan kerja yang baik pula. Mutu angkatan kerja antara lain tercermin dalam tingkat pendidikan dan pelatihan yang mereka ikuti.

## **2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Tenaga Kerja**

Dalam upaya meningkatkan produktivitas tenaga kerja di suatu perusahaan perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja pegawai/karyawan tersebut. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja karyawan baik yang berhubungan dengan tenaga kerja itu sendiri maupun faktor-faktor yang berhubungan dengan lingkungan perusahaan dan kebijakan pemerintah secara keseluruhan.

Menurut Tiffin dan Cormik (dalam Sutrisno 2009 : 103), menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja terdapat dua bagian yaitu :

- a. Faktor yang berasal dari dalam diri individu meliputi:
  - 1). Umur dan Usia
  - 2). Keadaan fisik individu
  - 3). Kelelahan
  - 4). Motivasi
- b. Faktor yang terdapat dari luar individu meliputi:
  - 1). Lama kerja
  - 2). Waktu istirahat
  - 3). Kompensasi seperti upah/Gaji dan insentif
  - 4). Kondisi organisasi
  - 5). Keluarga

Berdasarkan uraian diatas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja dapat dijabarkan sebagai berikut. Beberapa banyak faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja yang sering terjadi yaitu faktor imbalan dan motivasi. Imbalan pekerja sebagai pengorbanan yang telah diberikan kepada perusahaan akan mendorong pekerja merasa puas dan membuat pekerja lebih maksimal secara langsung dapat berdampak pada peningkatan produktivitas kerja. Demikian juga dengan motivasi kerja merupakan kunci keberhasilan dalam pencapaian dan tujuan akhir akan berpengaruh pada produktivitas kerja itu sendiri.

### **3. Aspek-Aspek Produktivitas Tenaga Kerja**

Menurut Jackson dalam Agustin (2014) tentang Produktivitas kerja, mengatakan bahwa ada empat aspek yang menentukan besar kecilnya produktivitas kerja seseorang, sebagai berikut :

a. Keterampilan

Setiap pekerja pasti ingin dengan segera menyelesaikan pekerjaannya dan memiliki motivasi untuk maju.

b. Kemampuan

Ingin berusaha dalam meningkatkan kemampuan dan kualitas kerjanya.

c. Sikap

Harus memiliki sikap yang baik dan sigap serta loyalitas dalam bekerja.

d. Perilaku

Dimana setiap seseorang pekerja pasti selalu ingin meningkatkan hasil produksi dan setiap pekerja selalu beringinan bekerjasama dalam berbagai hal dan rintangan yang dihadapi oleh pekerja.

#### **4. Penyerapan Tenaga Kerja**

Penyerapan Tenaga Kerja adalah jumlah tertentu dari tenaga kerja yang dipakai dalam suatu unit usaha tertentu juga. Penyerapan tenaga kerja yang dilakukan oleh jumlah tenaga kerja yang akan diserap dalam usaha tertentu. Dengan demikian, kemampuan penyerapan tenaga kerja akan berbeda dalam satu unit usaha dengan usaha yang lainnya karena kemampuan usaha unit yang selalu berbeda-beda (Indayati, 2010).

Penyerapan tenaga kerja yang mungkin dipertimbangkan dalam fungsi produksi adalah substitusi. Menurut Handoko (dalam Ridha, 2010 : 12), mengatakan bahwa penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh dua faktor seperti

faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yang dimaksud adalah antara lain tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, pengangguran dan tingkat bunga. Sedangkan faktor internal yang dimaksud adalah dipengaruhi oleh tingkat upah, produktivitas tenaga kerja, modal dan pengeluaran non upah. Sebuah perusahaan akan memilih untuk tidak ingin menentukan upah minimum sehingga akan mempekerjakan tenaga kerja dengan cara menegosiasi mengulang upah yang lebih rendah dengan cara sifat penyerapan tenaga kerja merupakan pengganti dengan tenaga kerja yang lain, pemanfaatan pengangguran, dan tenaga kerja yang memakai sistem kontrak (Cahuc, 2008).

Faktor-faktor yang mempengaruhi pada penyerapan tenaga kerja adalah adanya kebijakan dalam pengeluaran pemerintah yang dituangkan dalam APBD. Kebijakan pengeluaran pemerintah daerah dalam APBD tercermin dalam dari total belanja daerah pemerintah yang dialokasikan dalam anggaran daerah tersebut. Pengeluaran pemerintah, investasi memiliki pengaruh terhadap pada penyerapan tenaga kerja (Alfiat, 2012). Adanya anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah itu bersumber dari bantuan pusat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan bentuk dari akumulasi modal untuk pemerintah yang akan digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri.

## **5. Indeks Pembangunan Manusia**

Paradigma pembangunan yang sedang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang di ukur dengan pembangunan manusia yang dilihat dengan tingkat kualitas hidup manusia di tiap-tiap negara. Salah satu tolak ukur yang di gunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah IPM yang diukur

melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi (Daya beli). Melalui peningkatan ketiga indikator tersebut diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas hidup manusia (Mirza, 2012). Indeks tersebut pada tahun 1990 dikembangkan oleh pemenang nobel India Amartya Sen dan Mahbub Ul Haq seorang ekonom pakistan dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale University dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economics, sejak itu dipakai oleh Program Pembangunan PBB pada laporan HDI tahunannya. Digambarkan sebagai “pengukuran vulgar” oleh Amartya Sen karena batasannya. Indeks ini lebih fokus pada hal-hal sensitif dan berguna daripada hanya sekedar pendapatan perkapita yang selama ini digunakan dan indeks ini juga berguna sebagai jembatan bagi peneliti yang serius untuk mengetahui hal-hal yang lebih terperinci dalam membuat laporan pembangunan manusianya.

Pertumbuhan dan pembangunan sumber daya manusia akan selalu diupayakan oleh pemerintah setempat guna mempersiapkan generasi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat penduduk. Tolak ukur IPM yang menjadikan sangat penting untuk mengukur keberhasilan dalam pembangunan adalah semua yang terkait pada kesejahteraan masyarakat. Dari kata kesejahteraan itu mempunyai arti ketentraman, kesenangan hidup, kemakmuran, dan keamanan. Jika kondisi ini tercapai dengan baik maka prasyarat utama yang perlu dilakukan adalah dengan meningkatkan mutu kehidupan perseorangan melalui pembangunan manusia yang utuh atau betul tercapai.

Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada suatu negara atau daerah menunjukkan bahwa sejauh mana negara atau daerah itu mendapatkan mencapai sasaran untuk menentukan angka harapan hidup, pendidikan, tingkat pengeluaran,

dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup yang layak. IPM merupakan sebagai alat ukur yang peka untuk dapat memberikan arah perubahan yang betul terjadi.

Konsep pembangunan manusia yang sebenarnya adalah konsep yang menghendaki peningkatan kualitas hidup masyarakat baik secara fisik, mental maupun secara spritual. Kadang disebut juga dengan secara eksplisit disebutkan bahwa pembangunan yang dilakukan dicampurkan tangankan dengan pada pembangunan sumber daya manusianya dengan dikaitkan pada pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan SDM secara fisik dan mental mengandung makna peningkatan kapasitas dasar masyarakat yang kemudian akan memperlebar kesempatan untuk bisa berpartisipasi dalam proses pembangunan yang berkelanjutan. IPM yang dimaksudkan adalah untuk mengukur dampak dari upaya peningkatan kemampuan dasar tersebut, kemudian menggunakan indikator dampak sebagai komponen dasar penghitungannya, yaitu angka harapan hidup waktu ketika lahir, pencapain tingkat pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lamanya sekolah, serta pengeluaran konsumsi.

Lembaga *United Nations Development Programme* (UNDP) telah mempublikasikan laporan pembangunan sumber daya manusia dalam ukuran kuantitatif yang disebut *Human Development Indeks* (HDI). Meskipun HDI merupakan alat ukur pembangunan SDM yang dirumuskan secara konstan, diakui tidak akan pernah menangkap gambaran pembangunan SDM yang baik dan sempurna. Adapun indikator yang dipilih untuk mengukur dimensi HDI menurut *United Nations Development Programme* sebagai berikut:

- a. *Longevity*, diukur dengan variabel harapan hidup saat lahir (*life expectancy of birth*) dan angka kematian bayi per seribu penduduk (*infant mortality rate*).
- b. *Educational Achievement*, diukur dengan dua indikator, yakni melek huruf penduduk usia 15 tahun keatas (*adult literacy rate*) dan tahun rata-rata bersekolah bagi penduduk usia 25 tahun keatas (*the mean years of schooling*).
- c. *Acces to resource*, dapat diukur dengan secara makro melalui PDB riil perkapita dengan terminologi (*purchasing power parity*) dalam dolar AS dan dapat dilengkapi dengan tingkatan angkatan kerja.

## 6. Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia

Paradigma pembangunan menempatkan manusia sebagai fokus dan sasaran akhidari pembangunan, yaitu terjadinya penguasaan atas sumber daya, peningkatan pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan (Suharto, 2010 : 73).

Rumus perhitungan IPM menurut Suharto, (2010 : 80) yaitu, sebagai berikut:

$$IPM = 1/3 (\text{Indeks X (1)} + \text{Indeks X (2)} + \text{Indeks X (3)} \dots\dots\dots)$$

Dimana :

X (1) : Indeks harapan hidup

X (2) : Indeks pendidikan =  $\frac{2}{3}$  (indeks melek huruf) +  $\frac{1}{3}$  (indeks rata rata lama sekolah)

X (3) : Indeks standar hidup layak

Masing-masing indeks komponen IPM tersebut merupakan perbandingan antara selisih nilai suatu indikator dan nilai minimumnya dengan selisih nilai maksimum dan minimum indikator yang bersangkutan. Rumusnya adalah sebagai berikut :

$$\text{Indeks } X(i) = (X(i) - X(i) \text{ min}) / (X(i) \text{ maks} - X(i) \text{ min})$$

Dimana :

$X(i)$  : Indikator ke-i ( $i = 1,2,3$ )

$X(i)$  : Nilai maksimum  $X(i)$

$X(i)$  : Nilai minimum  $X(i)$

Dalam Suharto, Nilai maksimum dan minimum indikator  $X(i)$ .

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan reduksi Shortfall per tahun (*annual reduction in shortfall*) ukuran ini sederhana menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian yang masih harus ditempuh untuk mencapai titik ideal (IPM=100). Prosedur penghitungan reduksi shortfall IPM (=r) dapat dirumuskan sebagai berikut:

Dimana :

IPM(t) : IPM pada tahun t

IPM (t+n) : IPM pada tahun t+n

IPMideal : 100

## 7. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan *output* per kapita dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, terdapat dua sisi yang harus perlu

diperhatikan yaitu, dari sisi output total *Gross Domestic Product* (GDP) dan sisi dari jumlah penduduk. *Output* per kapita merupakan *output* total di bagi dengan jumlah penduduk. Hal ini di sebabkan terjadinya proses kenaikan *output* per kapita, dan harus dianalisis dengan melihat apa yang terjadi dengan output total di satu pihak, dan jumlah penduduk di lain pihak. Suatu teori pertumbuhan ekonomi yang lengkap dan jelas maka harus menjelaskan apa yang terjadi dengan GDP total dan dengan jumlah penduduk. Karena dengan mengkaitkan kedua aspek tersebut maka terjadi perkembangan *output* per kapita dapat dijelaskan dengan baik. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan pada suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Pertumbuhan ekonomi bisa terjadi apabila ada kenaikan output perkapita dimana dijelaskan kenaikan taraf hidup diukur dengan ouput riil per orang. Suatu perekonomian dikatakan mengalami sebagai pertumbuhan ekonomi jika jumlah produksi barang dan jasanya selalu naik.

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang disebabkan adanya kenaikan produksi barang dan jasa ataupun peningkatan pendapatan nasional. Adapun teori pertumbuhan ekonomi dengan teori Adam Smith mengatakan bahwa suatu perekonomian akan tumbuh dan berkembang jika ada penambahan penduduk yang akan memperluas pasar serta mendorong spelisasinya. Perekonomian suatu negara tidak gampang tumbuh begitu saja dan tumbuh sendirinya ada terdapat beberapa yang menjadikan faktor suatu pertumbuhan ekonomi menjadi semakin membaik dan maju yaitu terdapat dari Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA), Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, faktor Budaya, dan faktor Sumber Daya Modal.

Teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan bahwa mengenai faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi dalam waktu jangka panjang. Secara umum, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai peningkatan dalam kemampuan suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada kearah yang bersifat kuantitatif (*quantitatif change*) dan biasanya diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan output per kapita. PDB adalah total nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dinilai dari sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan pundi-pundi atau pendapatan masyarakat itu sendiri pada satu periode tertentu. Kegiatan perekonomian merupakan proses penggunaan faktor-faktor produksi berupa tenaga kerja (*labour*) dan modal (*capital*) untuk menghasilkan output.

Proses pembangunan juga mencakup pada perubahan komposisi produksi, perubahan pada pola penggunaan sumber daya produksi (*productive resources*) di antaranya pada sektor kegiatan ekonomi, perubahan pada pola pembagian (distribusi) kekayaan dan pendapatan diberbagai golongan pada pelaku ekonomi, perubahan terhadap kerangka kelembagaan (*institutional framework*) dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Hal yang penting dalam proses pembangunan adalah semakin meluasnya kesempatan kerja yang bersifat produktif. Pembangunan ekonomi sebenarnya harus mensyaratkan partisipasi aktif pada semua golongan masyarakat yang mampu berperan aktif dalam proses ekonomi kedalam bersifat memajukan kegiatan ekonomi masyarakat tersebut.

## **8. Belanja Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 29 tahun 2002 Pasal 1 menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD. Menurut Sri Lesminingsih (Abdul Halim, 2001 : 199) menyebutkan bahwa pengeluaran daerah adalah semua pengeluaran kas daerah selama periode tahun anggaran bersangkutan yang mengurangi kekayaan pemerintah daerah. Pengelolaan belanja daerah ada tiga tujuan pokok yang ingin dicapai yaitu dengan menjamin dijalkannya disiplin fiskal melalui pengendalian belanja, menyesuaikan alokasi anggaran dengan arah kebijakan anggaran dan prioritas anggaran, serta menjamin efisiensi dan efektivitas alokasi anggaran. Pengelolaan belanja akan menyesuaikan arah kebijakan anggaran terutama yang berhubungan dengan kebijakan ekonomi yang ditempuh oleh pemerintah pusat atau daerah. Pengelolaan belanja daerah memang harus fokus kepada prinsip transparansi dan akuntabilitas, partisipatif, disiplin anggaran, berkeadilan, efisien dan efektif. Belanja daerah dibagi dua kelompok, yaitu:

### **a. Belanja Langsung**

Belanja langsung merupakan memantapkan pembangunan infrastruktur yang mendukung pemerintah daerah, seperti peningkatan jalan dan jembatan ruas kabupaten, pembangunan infrastruktur keciptakaryaan, tata ruang dan kebersihan, kemudian peningkatan infrastruktur pengairan.

b. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan penganggaran belanja yang tidak langsung, seperti belanja pegawai, belanja bunga, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Pasal 1 menyatakan bahwa keuangan negara yang disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menyebutkan APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPR. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah harus dicatat dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi, sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi atau tugas pembantuan tidak dicatat dalam APBD.

Dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 menyebutkan bahwa memprioritaskan semua perlindungan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang mewujudkan kedalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak untuk masyarakat dan mengembangkan layanan jaminan sosial. Untuk menciptakan modal manusia yang berkualitas dan bermutu, peran pemerintah sangat penting dalam mengalokasikan anggaran sektor pendidikan, kesehatan dan tidak lupa juga dengan infrastrukturnya. Adanya pengeluaran pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang dilakukan pemerintah diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui peningkatan keterampilan, kesehatan bagi masyarakat, pengetahuan dan sehingga

akan mampu meningkatkan produktivitas yang tinggi dan juga akan bersaing dalam perekonomian. Dengan demikian, apabila ini terjadi terlaksana dengan baik dan menciptakan lingkungan yang baik maka memungkinkan masyarakat menikmati hidup yang baik, sehat, dan sehingga dapat meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi pada suatu daerah.

## **9. Pembangunan Manusia**

Mengutip isi *The Human Development Report* (HDR) pertama tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut yaitu, pilihan yang terpenting adalah berumur panjang dan sehat, berilmu pengetahuan bagus dan mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup layak. Salah satu studi mengenai pembangunan manusia tertulis dalam *The Human Development Report* (2016). Dalam isi tersebut terdapat beberapa pokok pikiran penting, yaitu:

- a. Kepedulian satu sama lain (*universalism*) merupakan kunci bagi pembangunan manusia dimanapun mereka tinggal.
- b. Masih ada kelompok masyarakat yang hidup dalam kemiskinan dan memiliki keterbatasan untuk mengatasi masalah yang ada.
- c. Kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia sudah layaknya diimplementasikan.
- d. Tata kelola pemerintah yang bersih dan adil akan mendorong terciptanya pembangunan manusia secara optimal.

Menurut *The United Nations Development Programme* (UNDP) menyebutkan bahwa dimensi pembangunan terdiri dari dua aspek, yaitu:

- a. Peningkatan Kemampuan Manusia, yang terdiri dari peningkatan waktu hidup yang lebih lama dan sehat, peningkatan pengetahuan, serta peningkatan standar kehidupan yang layak.
- b. Penciptaan kondisi yang memungkinkan terjadinya pembangunan manusia.

Menurut Deddy T. Tikson (2005) berpendapat bahwa pembangunan diartikan sebagai transformasi ekonomi, strategi, dan budaya yang secara sengaja melalui kebijakan dan juga strategi menuju kearah yang diinginkannya. Pembangunan manusia diartikan dengan pemahaman tentang konsep pekerjaan. Pada dasarnya, pekerjaan memberi rasa aman secara ekonomi. Pekerjaan juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Dalam arti lebih luas, pekerjaan tidak hanya sekedar dalam upaya untuk meningkatkan kekayaan ekonomi, namun itu bisa memperluas pengetahuan, sehingga bisa dapat membentuk sebuah nilai budaya dan seni. Maka dari itu pekerjaan menciptakan kreativitas, potensial yang tinggi, dan semangat membangun. Sementara itu untuk mengukur tingkat pembangunan manusia yang baik, maka diciptakannya seperangkat instrumen yang bisa ditiru dengan berbagai negara, sekaligus menjadi acuan dalam menilai yang lebih jauh dalam perkembangan pembangunan manusia.

## **10. Pengaruh Belanja Daerah Menurut Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Produktivitas Tenaga kerja**

Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan sangatlah penting dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik melalui pendidikan. Pengeluaran pemerintah jika telah terealisasi dalam sektor pendidikan akan meningkatkan angka melek huruf dan lamanya dalam pendidikan yang di dapat diakses oleh masyarakat (Daegal, 2015). Pengeluaran pembangunan oleh pemerintah seperti pembangunan gedung sekolah, subsidi dan lainnya. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terbagi subsektor yaitu antara lain pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, non formal dan informal, kedinasan, pendidikan keagamaan, litbang penelitian, pendidikan tinggi, pelayanan bantuan, pembinaan kepemudaan dan olahraga (Kemenkeu, 2017). Seperti halnya pengeluaran pemerintah Kota Medan disektor pendidikan adanya pengeluaran bidang pendidikan, keputakaan, kepemudaan dan olahraga.

Dalam hal ini terdapat alokasi pengeluaran pemerintah Kota Medan dalam sektor pendidikan seperti Program pelayanan adminitrasi perkantoran (penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, alat tulis kantor dan sebagainya), Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur (pengadaan perlengkapan kantor, komputer dan sebagainya), Program pendidikan anak usia dini, Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, Program pendidikan menengah, Program pendidikan non formal, Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dan Program manajemen pelayanan pendidikan. Pentingnya sumber daya manusia yang dilakukan oleh pemerintah agar dapat dilihat adanya alokasi pemerintah pada bidang pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang

penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Dengan adanya penyediaan alokasi bantuan pemerintah kepada semua masyarakat bisa memperoleh pendidikan bagus atau layak terutama masyarakat yang tidak mampu. Adanya alokasi pemerintah dibidang pendidikan untuk kepada masyarakat sehingga akan mendorong dan memajukan peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu dengan melalui bidang pendidikan.

Menurut Rubenstein (2003) mengungkapkan bahwa kualitas pendidikan di suatu daerah dapat di ukur berdasarkan 2 faktor yaitu:

- a. Banyaknya jumlah sekolah, dengan asumsi bahwa walaupun sekolah tersebut miskin tetapi selama murid masih tertarik untuk bersekolah maka hal tersebut mengindikasikan bahwa minat murid untuk belajar sesuatu.
- b. *Literacy rate*, atau jumlah penduduk yang dapat baca tulis dari total seluruh jumlah penduduk yang ada. Di negara-negara maju *Literacy rate* mencapai hingga 95%.

Ketersediaan fasilitas pelayanan baik fisik maupun non fisik sangat mempengaruhi perkembangan pendidikan di suatu daerah, dalam bidang fisik seperti ketersediaan sarana standart dalam pembangunan gedung pendidikan maupun sarana laboratorium, juga bidang non fisik seperti besar adanya bantuan biaya pendidikan. Pemerintah harus lebih fokus terhadap pendidikan sebagai faktor penting dalam meningkatkan pembangunan nasional. Jika halnya terlihat dari besarnya pengeluaran pemerintah dari sektor pendidikan. Pemerintah menyediakan anggaran minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk bidang pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2003 tercantum Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 bahwa mengatakan dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Meningkatnya pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan akan berpengaruh terhadap kemajuan di sektor pendidikan yaitu dengan meningkatnya jumlah murid yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat keperguruan tinggi.

Ketersediaan fasilitas pelayanan pendidikan yang baik fisik maupun non fisik ini sangat mempengaruhi pada perkembangan suatu pendidikan di daerah itu sendiri, dalam bidang fisik seperti halnya ada ketersediaan sarana yang standart dalam pembangunan gedung pendidikan maupun sarana laboratorium, dan juga bidang non fisik seperti halnya ada bantuan biaya pendidikan kepada masyarakat. Muta'ali, Lutfi (2000) menjelaskan tentang metode pengklasifikasian ketersediaan fasilitas pelayanan, yaitu sebagai berikut:

- a. Ketersediaan pelayanan (*Availability Service*) yaitu dengan mengukur ada atau tidaknya fasilitas pelayanan. Apabila fasilitas pelayanan tersedia diberi nilai 1 (satu) dan jika fasilitas pelayanan tidak tersedia maka diberi nilai 0 (nol).
- b. Tingkat ketersediaan (*Size of Availability*) yaitu dengan mengukur jumlah unit suatu fasilitas pelayanan yang tersedia. Metode yang sering digunakan adalah dengan Skalogram. Dengan Skalogram dapat dikelompokkan kecamatan-kecamatan (membuat hirarki) berdasarkan total bobot fasilitas pelayanan yang dimiliki masing-masing kecamatan.

Peningkatan partisipasi sekolah penduduk tentunya harus diimbangi dengan penyediaan sarana fisik pendidikan maupun tenaga guru yang memadai. Di tingkat pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), SD, SMP dan SMA, ini harus ditingkatkan dengan baik dan serius supaya masyarakat mudah menyekolahkan anak-anak mereka sampai tamat pendidikannya. Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja, sebab peningkatan produktivitas tenaga kerja yang bertujuan kepada pendidikan. Pada dasarnya bertujuan agar meningkatkan kemampuan kerja manusia dan untuk meningkatkan taraf hidup semua kalangan masyarakat.

Seperti pada umumnya bahwa seseorang yang memiliki tingkat pendidikannya yang lebih tinggi maka akan mempunyai ilmu pengetahuan yang baik dan luas dalam untuk meningkatkan kinerjanya. Pendidikan memiliki arti dalam meningkatkan merekrut tenaga kerja yang handal. Hal ini yang dimaksud adalah untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja sebab pendidikan baik formal dan non formal seseorang diharapkan mempunyai kemampuan untuk lebih mengetahui dalam mengadaptasi dilingkungan kerjanya dengan lebih cepat.

## **11. Pengaruh Belanja Daerah Menurut Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Produktivitas Tenaga Kerja**

Pengeluaran pemerintah dibidang sektor kesehatan merupakan salah satu upaya mendapatkan kewajiban hak-hak masyarakat agar menerima pelayanan kesehatan yang layak (Kuncoro, 2013). Sama seperti halnya pengeluaran pemerintah daerah Kota Medan seperti bidang kesehatan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Dalam hal ini juga terdapat alokasi pengeluaran pemerintah

Kota Medan dalam sektor kesehatan antara lain yaitu adanya Program obat dan perbekalan kesehatan, Program upaya kesehatan masyarakat, Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, Program perbaikan gizi masyarakat, Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas, Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita, lansia dan Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak. Melihat faktor manusia dari sisi kesehatan sebab kesehatan merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi sumber daya manusia, dengan demikian kesehatan juga mempengaruhi kualitas manusia (Tjiptoherijanto dalam Astri, 2013). Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang anggaran kesehatan menyatakan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah pusat mengalokasikan minimal 5% dari APBN di luar gaji, sementara besar anggaran kesehatan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota mengalokasikan minimal 10% dari APBD diluar gaji (Rumate, 2015).

Kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia, dengan demikian aspek kesehatan sangat mempengaruhi kualitas tubuh manusia. Semakin tinggi kesehatan pada masyarakat maka akan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia yang berimplikasi dengan tujuan indeks pembangunan manusia (Setiawan, 2013). Jika manusia kekurangan vitamin, kalori, gizi, dan rendahnya keadaan tubuh manusia akan menghasilkan kualitas manusia yang rendah dan tidak bersemangat beraktivitas karena keadaan kesehatannya yang sangat rendah. Lembaga WHO dalam piagam Ottawa untuk promosi Kesehatan, mengatakan bahwa kesehatan adalah sumber daya bagi

kehidupan sehari-hari, bukan tujuan kesehatan adalah konsep positif menekankan sumber daya sosial dan pribadi, serta kemampuan fisik. Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan di kota Medan ditujukan agar semua lapisan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan dengan mudah, merata, murah, dan terjangkau sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Melalui peningkatan mutu pelayanan kesehatan, peningkatan mutu lingkungan permukiman dan perbaikan status gizi masyarakat diharapkan dapat tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang semakin membaik. Alokasi belanja daerah dibidang kesehatan mampu meningkatkan IPM artinya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan dalam pembangunan kesehatan.

Berbagai studi bahwa membuktikan peningkatan kualitas sumber kesehatan masyarakat yang signifikan akan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Adanya alokasi pemerintah dibidang kesehatan diarahkan supaya pelayanan kesehatan untuk masyarakat bisa terjangkau lebih luas dan merata sehingga betul-betul dirasakan oleh masyarakat setempat. Dengan kebijakan ini akan tercapai kualitas kesehatan masyarakat yang akan lebih baik lagi, sehingga diprediksi masyarakat akan lebih sehat dan tingkat produktivitas tenaga kerjanya akan meningkat. Hal ini disebabkan akan meningkatkan tingkat kerja seseorang, karena masyarakat penduduk mampu dengan fisik dan mental. Peningkatan kualitas kesehatan juga salah satu faktor meningkatkan kinerja masyarakat itu sendiri.

## **12. Pengaruh Belanja Daerah Menurut sektor Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Produktivitas Tenaga Kerja**

Infrastruktur pembangunan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial. Infrastruktur ekonomi adalah infrastruktur fisik, baik yang digunakan dalam proses produksi maupun yang dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Artinya infrastruktur ekonomi tersebut meliputi semua prasarana umum seperti tenaga listrik, perhubungan, irigasi, telekomunikasi, air bersih, dan lain-lain. Sedangkan infrastruktur sosial yaitu yang mendukung kesejahteraan sosial meliputi prasarana kesehatan dan pendidikan (Ramelan, 1997).

Begitu juga halnya pemerintah Kota Medan mengalokasikan disektor infrastruktur seperti perencanaan pembangunan, perangkat daerah, komunikasi dan informatika. Dalam hal ini terdapat beberapa alokasi pemerintah Kota Medan dalam sektor Infrastruktur antara lain yaitu Program pembangunan saluran drainase atau gorong-gorong, Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan, Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan, Program pembangunan jalan dan jembatan, Program pengembangan perumahan, Program lingkungan sehat perumahan dan lain sebagainya. Dengan demikian, dapat dilihat dari kenyataan bahwa daerah yang mempunyai kelengkapan sistem infrastruktur yang baik, mempunyai tingkat IPM yang baik pula, mempunyai laju pertumbuhan ekonomi yang baik juga, dibandingkan dengan daerah yang mempunyai kelengkapan infrastruktur yang terbatas. Maka dari itu bisa dikatakan bahwa

penyediaan infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci dalam pembangunan disuatu daerah atau secara nasional (Bappenas, 2003).

Perbaikan kualitas modal manusia tergantung adanya tersedia infrastruktur untuk menarik investasi pada sumber daya manusianya. Pada suatu negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mampu melakukan pada pemerataan pembangunan kemudian akan melakukan pembangunan infrastruktur keseluruhan wilayah. Suatu perekonomian yang terintegrasi akan membutuhkan pembangunan infrastruktur (Daegal, 2015). Pada pembangunan transportasi dan perumahan merupakan barang publik yang harus disediakan oleh pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Tersedianya perumahan yang layak huni akan membuat kualitas hidup masyarakat akan menjadi lebih baik dan makmur, karena perumahan yang layak dan mendukung kesehatan pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas sumber daya manusia. Bidang transportasi yang terintegrasi dengan baik pula akan meningkatkan dan melancarkan distribusi kegiatan ekonomi dan juga meningkatkan jangka panjang yang menjadikan media pemerataan pembangunan daerah. Infrastruktur itu sendiri dalam sebuah sistem menopang sistem sosial dan sistem ekonomi serta penghubung dengan sistem lingkungan. Ketersediaan infrastruktur mempengaruhi sistem sosial dan sistem ekonomi dimasyarakat.

Pembangunan manusia sangat erat pada ketersediaan infrastruktur dalam menunjang investasi sumber daya manusia serta untuk perbaikan dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Adanya pengeluaran pemerintah untuk bidang infrastruktur ini merupakan agar diharapkan masyarakat mampu meningkatkan ekonomi masing-masing dan jika infrastruktur ini berjalan

dengan baik maka kehidupan masyarakat akan mengalami hidup yang makmur, sejahtera dan Indeks Pembangunan Manusia selalu baik.

Menurut Daryanto (2012 : 41), mengatakan bahwa produktivitas adalah sebuah konsep yang menggambarkan hubungan antara hasil (jumlah barang dan atau jasa yang diproduksi) dengan sumber jumlah tenaga kerja, modal, tanah, energi, dan sebagainya untuk menghasilkan hasil tersebut. Ketersediaan infrastruktur disuatu wilayah atau daerah sangat penting, karena untuk membangun kualitas sumber daya manusianya supaya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan juga meningkatkan laju produktivitas kinerja disuatu daerah tersebut. Dan disinilah peran infrastruktur sangat penting dalam proses produksi. Hal ini alokasi pemerintah dalam bidang infrastruktur betul-betul terlaksana dengan baik agar dalam pembangunan dapat dilihat dalam kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat penduduk dan dalam kinerjanya yang implikasinya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Infrastruktur memiliki peranan yang sangat besar dalam meningkatkan suatu perekonomian daerah tersebut, maka dari itu pembangunan bidang infrastruktur perlu untuk terus di dorong agar masyarakat penduduk akan merasakan adanya infrastruktur ini. Infrastruktur mempunyai sifat eksternalitas, sesuai dengan sifatnya maka dari itu infrastruktur disediakan oleh pemerintah dan bagi setiap pihak yang memakai infrastruktur tidak memberikan bayaran secara langsung atas penggunaan infrastruktur tersebut. Maksud dari infrastruktur yaitu seperti jalan, kesehatan, pendidikan, dan memiliki sifat eksternalitas yang positif. Dan memberikan dukungan kepada fasilitas yang ada agar dapat meningkatkan produktivitas suatu pekerja dan juga dalam proses produksinya.

## B. Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian sebelumnya dalam tabel :

NO	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Analisa	Hasil
1.	Abdul Kadir Mahulauw, Dwi Budi Santosa, Putu Mahardika (2016)  Pengaruh Pengeluaran Kesehatan dan Pendidikan serta Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Maluku.	Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Pendapatan Perkapita, IPM	Menggunakan Analisis Jalur (Path Analysis)	Hasil analisis menunjukkan secara simultan bahwa ketiga jenis pengeluaran pemerintah tersebut berpengaruh signifikan terhadap IPM dan ditemukan bahwa dengan R Square 68.1% dan 31.9% dijelaskan oleh variabel lain diluar model secara parsial pendapatan perkapita sebagai variabel intervening tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan IPM.
2.	Intan Safitri (2016)  Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor	Pengeluaran Sektor Kesehatan, Pendidikan, Infrastruktur, dan IPM	Menggunakan analisis <i>Random Effect Model</i> (REM)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur memiliki pengaruh positif terhadap

	Kesehatan, Pendidikan, dan Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Aceh.			IPM dengan tingkat signifikansi yang berbeda-beda. Adapun pengeluaran pemerintah yang signifikan terhadap IPM adalah pengeluaran sektor kesehatan, sedangkan pengeluaran sektor pendidikan dan infrastruktur tidak pengaruh signifikan. Pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat melakukan kebijakan-kebijakan sehingga pengeluaran dapat menjadi signifikan terhadap IPM dengan melakukan pengeluaran secara merata.
3.	Theresia Militina, Anis Rachma utary (2016)  Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah daerah sektor Pendidikan	Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur	Menggunakan analisis jalur (Path Analysis)	Menunjukkan bahwa dalam mempengaruhi tingkat pengangguran, pengeluaran anggaran bidang pendidikan berpengaruh langsung dan tidak signifikan. Pengeluaran bidang infrastruktur berpengaruh langsung

	dan Kesehatan serta Infrastruktur terhadap Pengangguran serta tingkat Kemiskinan.			dan tidak signifikan dan pengeluaran bidang kesehatan berpengaruh langsung dan tidak signifikan.
4.	Nurvita Sari, Yulmard, Adi Bhakti (2016)  Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk dan Produktivitas tenaga kerja terhadap Penyerapan tenaga kerja di Kota Jambi.	Pertumbuhan ekonomi, Pertumbuhan Penduduk, Produktivitas tenaga kerja	<i>Ordinary Least Square</i> (OLS)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga variabel yaitu pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, dan produktivitas tenaga kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Jambi.
5.	Muliza T. Zulham Chenny Seftarita (2017)	IPM, Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Kemiskinan,	Menggunakan analisis <i>Random Effect Model</i> (REM)	Hasil ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah disektor pendidikan dan kesehatan tidak

	Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat kemiskinan dan PDRB terhadap IPM di Provinsi Aceh.	PDRB		berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, hal ini terjadi karena pemerintah kabupaten/kota masih lebih dominan mengalokasikan belanjanya yang pada jenis belanja yang secara tidak langsung memberikan pengaruh terhadap IPM. Sedangkan variabel kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, maka dengan menurunnya tingkat kemiskinan dapat meningkatkan IPM. PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, yang berarti PDRB meningkat maka IPM juga akan meningkat.
6.	Septiana M.M. Sanggelorang, Vekie A. Rumate, Hanly F.DJ. Siwu (2015)	Pendidikan, Kesehatan, IPM	Menggunakan analisis Regresi Linier Berganda	Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh positif, yaitu meningkat

	Pengaruh pengeluaran Pemerintah disektor Pendidikan, dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara.			sebesar 0,870 dan secara statistik signifikan terhadap IPM. Dan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh negatif, yaitu sebesar -0,438 dan secara statistik tidak berpengaruh terhadap IPM di Sulawesi Utara.
7.	Ryan Andreas (2012)  Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan dan Investasi terhadap Produktivitas tenaga kerja di Kota Medan.	Produktivitas tenaga kerja, Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan, dan Investasi	Menggunakan metode <i>Ordinary Least Square (OLS)</i>	Hasil analisis menunjukkan bahwa keseluruhan variabel independen (tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan investasi) memiliki kemampuan menjelaskan variasi produktivitas tenaga kerja selama kurun waktu 1990-2009 sebesar 75%, dan 25% dijelaskan oleh variabel lain diluar estimasi. Tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan investsi di estimasikan berpengaruh positif terhadap

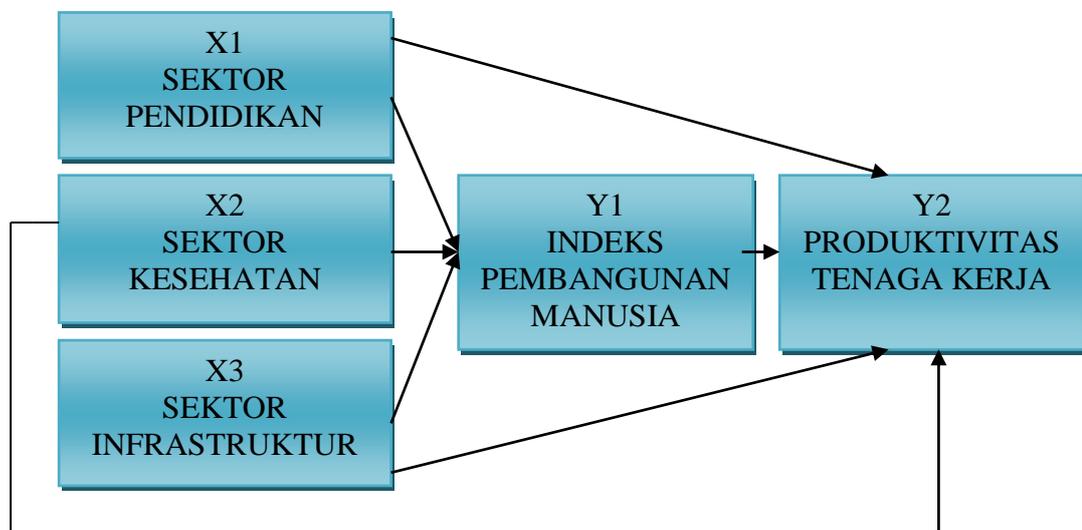
				<p>produktivitas tenaga kerja. Secara parsial dapat dibuktikan bahwa variabel independen tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan investasi di estimasikan berpengaruh signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja.</p>
8.	<p>Febri Aquariansyah (2018) Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah bidang Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Bandar Lampung tahun 2010-2016 dalam persepektif Ekonomi Islam.</p>	<p>Pendidikan, kesehatan, dan IPM</p>	<p>Menggunakan analisis Regresi Linier Berganda</p>	<p>Hasil ini menunjukkan bahwa secara parsial pendidikan berpengaruh signifikan terhadap IPM. Kemudian kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Hasil uji F belanja pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan berpengaruh signifikan terhadap IPM.</p>

9.	Santi Nurmainah (2013)  Analisis Pengaruh Belanja modal pemerintah daerah, Tenaga kerja terserap dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan.	Belanja modal pemerintah daerah, Daya serap tenaga kerja, IPM, Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan.	Menggunakan <i>Structural Equation Modeling</i> (SEM)	Hasil ini menunjukkan bahwa keempat hipotesis yang diajukan diterima dan satu hipotesis ditolak. Hipotesis 1 menyatakan bahwa belanja modal pemerintah daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hipotesis 2 menyatakan bahwa penyerapan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hipotesis 3 menyatakan bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hipotesis 4 menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hipotesis 5 menyatakan bahwa IPM adalah efek signifikan negatif terhadap kemiskinan.
----	--	---	---	--

10.	Asya Yandi Dea Kristina (2017)  Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Indeks Pembangunan Manusia dan Tenaga kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto (38 Kabupaten/Ko ta di Provinsi Jawa Timur tahun 2011- 2016).	PDRB, PAD, IPM, tenaga kerja	Menggunakan Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian ini dengan model yang terpilih <i>Fixed Effect Model</i> menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien 38.25679, IPM berpengaruh negatif dan signifikan dengan koefisien sebesar - 514690.0, tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien 26.10263. sedangkan nilai koefisien determinasi (R <sup>2</sup> ) adalah 0.99 atau 99%., ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel pendapatan asli daerah, IPM, dan tenaga kerja dalam menjelaskan produk domestik regional bruto adalah sebesar 99%.
-----	--	------------------------------------	---	---

### C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan teori-teori yang mendukung dalam penelitian ini menyatakan bahwa Pengeluaran Belanja Daerah Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Produktivitas Tenaga Kerja. Maka disusun kerangka konsep penelitian sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

### D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang menjadi objek penelitian dimana kebenarannya masih perlu dikaji dan diteliti melalui data yang terkumpul. Berdasarkan perumusan diatas, maka penulis membuat hipotesisnya yaitu :

1. Belanja daerah sektor Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Indeks pembangunan Manusia di kota Medan.

2. Belanja daerah sektor Kesehatan berpengaruh signifikan terhadap Indeks pembangunan Manusia di kota Medan.
3. Belanja daerah sektor Infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap Indeks pembangunan Manusia di kota Medan.
4. Belanja daerah sektor Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas Tenaga Kerja di kota Medan.
5. Belanja daerah sektor Kesehatan berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas Tenaga Kerja di kota Medan.
6. Belanja daerah sektor Infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas Tenaga Kerja di kota Medan.

**BAB III**  
**METODOLOGI PENELITIAN**

**A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan kuantitatif. Metode analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui perkembangan dari setiap variabel penelitian, sedangkan metode analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis jalur (*Path Analysis*).

**B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Waktu penelitian ini di mulai dari bulan Oktober 2018 sampai dengan dengan selesai pada tahun 2019. Untuk lebih jelasnya seperti dirincikan pada tabel berikut:

**Tabel. 3.1 Jadwal Penelitian**

No.	Aktivitas	Bulan/tahun				
		September 18	Desember 18	Mei 19	Jun 19	Jul 19
1	Riset awal/pengajuan judul					
2	Penyusunan proposal					
3	Seminar proposal					
4	Perbaikan / acc proposal					
5	Pengolahan data					
6	Penyusunan skripsi					
7	Bimbingan skripsi					
8	Meja hijau					

*Sumber :Disusun Peneliti 2019*

### C. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional akan menjelaskan cara pengukuran variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian menggunakan skala ukuran yang diterima secara akademis. Penelitian ini menggunakan tiga variabel atau variabel endependen yang akan diukur, yaitu belanja daerah sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta indeks pembangunan manusia dan produktivitas tenaga kerja sebagai variabel independen.

**Tabel. 3.2 Definisi Operasional dan Indikator**

<b>Variabel</b>	<b>Definisi Operasional</b>	<b>Indikator</b>
Belanja Daerah Sektor Pendidikan	besarnya pengeluaran pemerintah dari total APBD yang dialokasikan untuk membiayai pembangunan dalam sektor pendidikan.	1. SDM 2. Belanja Modal
Belanja Daerah Sektor Kesehatan	besarnya pengeluaran pemerintah dari total APBD yang dialokasikan untuk membiayai pembangunan dalam sektor kesehatan.	1. SDM 2. Belanja Modal
Belanja Daerah Sektor Infrastruktur	besarnya pengeluaran pemerintah dari total APBD yang dialokasikan untuk membiayai pembangunan dalam sektor infrastruktur.	1. SDM 2. Belanja Modal

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	salah satu indikator komposit tunggal yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian pembangunan manusia berdasarkan yang dikeluarkan oleh <i>United Nations Development Programme</i> (UNDP).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Angka harapan hidup ketika lahir</li> <li>2. Rata-rata lama sekolah (melek huruf di atas 15 tahun)</li> <li>3. Hidup layak (daya beli)</li> </ol>
Produktivitas Tenaga Kerja	suatu pencapaian dalam perbandingan antara hasil (output) dengan jumlah sumber daya yang diperlukan (input).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah hasil kerja</li> <li>2. Kualitas hasil kerja</li> <li>3. Ketepatan waktu</li> </ol>

#### **D. Populasi dan Sampel**

Populasi merupakan wilayah generalisasi, objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2014 : 80). Penelitian ini dilakukan di kota Medan Provinsi Sumatera Utara, dengan mengambil laporan keuangan Pemerintah Kota Medan bagaimana masyarakat menilai mengenai belanja daerah di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang diberikan kepada pemerintah setempat.

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto 2013 : 174). Dan sampelnya dari data laporan keuangan Pemerintah Kota Medan pada tahun 2010-2017.

### **E. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder dengan runtun waktu (*time series*). Data sekunder merupakan diperoleh oleh peneliti melalui banyak mencari sumber yang sebelumnya sudah ada atau data yang langsung. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data BPS ( Badan Pusat Statistik ) dan Pemko Medan.

### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dan mengolah data dari informasi terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data diperoleh tahun 2010 sampai dengan 2017 (8 tahun).

### **G. Metode Analisa Data**

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai jenis dan tekkn analisis yang digunakan dalam penelitian. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Path Analysis (analisis jalur). Analisis jalur bertujuan untuk membuktikan hipotesis, yaitu membuktikan apakah Belanja daerah sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur menjadi variabel utama dalam mendukung dari Indeks Pembangunan dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan persamaan sebagai berikut :

#### **Persamaan Aplikasi**

1. Persamaan 1       $Y_1 = P_1X_1 + e$
2. Persamaan 2       $Y_1 = P_2X_2 + e$
3. Persamaan 3       $Y_1 = P_3Y_1X_3 + e$

4. Persamaan 4       $Y_2 = P_4Y_2X_2 + P_4Y_2Y_1 + e$
5. Persamaan 5       $Y_2 = P_5Y_2X_2 + P_5Y_2Y_1 + e$
6. Persamaan 6       $Y_2 = P_6Y_2 + P_6Y_2Y_1 + e$

Keterangan :

- $Y_1$                     = Indeks Pembangunan Manusia
- $Y_2$                     = Produktivitas Tenaga Kerja
- $X_1$                     = Sektor Pendidikan
- $X_2$                     = Sektor Kesehatan
- $X_3$                     = Sektor Infrastruktur
- $\epsilon$                     = *Error Term* / Tingkat Kesalahan

Analisis Jalur (Path Analysis) didukung oleh uji mediasi. Uji Mediasi bertujuan untuk menguji apakah variabel intervening berfungsi sebagai mediasi atau perantara. Dengan syarat :

$P_1 < P_2 \times P_3$  atau (pengaruh langsung < pengaruh tidak langsung) maka  $H_a$  diterima

$P_1 > P_2 \times P_3$  atau (pengaruh langsung > pengaruh tidak langsung) maka  $H_a$  ditolak

Untuk mengetahui kelayakan model analisis jalur, maka akan dilakukan ujiasumsi klasik yang bertujuan untuk mengetahui apakah hasil estimasi jalur yang dilakukan benar-benar layak digunakan atau tidak. Uji asumsi klasik yang digunakan, yaitu :

1. Uji Normalitas Data

Dalam penelitian ini pengujian Normalitas Data dideteksi melalui analisa grafik histogram dan normal P-P Plot yang dihasilkan dari Aplikasi SPSS.

## 2. Uji Multikolinieritas Data

Uji multikolinieritas Data dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Data yang baik jika terbebas dari masalah Multikolinieritas Data

## 3. Uji Autokorelasi Data

Dalam penelitian ini pengujiannya melalui dengan syarat 1-3, jika nilai D melebihi dari 1-3 maka data dinyatakan lulus dari Uji Autokorelasi Data.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Kota Medan**

Zaman dahulu kala kota Medan dikenal sebagai Tanah Deli dan keadaan tanah berawa-rawa kurang lebih 4000 ha. Beberapa sungai melintasi kota Medan ini semuanya bermuara ke Selat Malaka. Sungai-sungai itu yaitu sei Deli, Sei Babura, Sei Sikambing, Sei Denai, Sei Putih, Sei Badra, Sei Belawan, Sei Sulang-saling/sei Kera. Pada awalnya yang membuka perkampungan Medan adalah Guru Patimpus. Patimpus adalah anak dari Tuan Si Raja Hita, pemimpin Karo yang tinggal dikampung Pekan. Kemudian Tuan Si Raja Hita menolak menggantikan ayahnya dan lebih tertarik pada ilmu pengetahuan dan mistik, sehingga dikenal sebagai Guru Patimpus sejak tahun 1614-1630 M, dan dia belajar agama islam dan di islamkan oleh Datuk.

Selanjutnya Guru Patimpus menikah dengan adik Tarigan, pimpinan daerah yang sekarang bernama Pulau Brayon dan membuka Desa Medan yang terletak di antara Sungai Babura dan Sungai Deli. Oleh karena itu, nama Guru Patimpus saat ini diabadikan sebagai nama jalan utama di daerah kota Medan. Sejak zaman penjajahan, masyarakat selalu merangkaikan Medan dengan Deli, tetapi setelah zaman kemerdekaan lama kelamaan istilah Medan berangsur-angsur hilang. Terdapat berbagai sumber literatur mengenai asal-usul kata Medan itu sendiri, diantaranya dari catatan penulis-penulis Portugis yang asalnya dari awal abad ke-16 disebutkan bahwa Medan berasal dari nama "Medin". Medan pertama kali

ditempati oleh orang-orang suku Batak, Karo, hanya setelah penguasa aceh yang bernama Sultan Iskandar Muda mengirim panglimanya yang bernama Gocah Pahlawan bergelar Laksamana Khoja Bintan untuk dijadikan wakil kerajaan Aceh di Tanah Deli, maka kerajaan Deli mulai berkembang. Perkembangan ini ikut mendorong pertumbuhan dari segi penduduk maupun kebudayaan di Medan. Dimasa pemerintahan sultan deli kedua, Tuanku Panglima Parunggit (masa pemerintahan dari tahun 1669-1698) terjadi sebuah perang kavaleri di Kota Medan. Sejak saat itu, Medan menjadi pembayar upeti kepada Sultan Deli. Medan tidak mengalami perkembangan pesat hingga tahun 1860-an, ketika penguasa-penguasa dari Belanda mulai membebaskan tanah untuk perkebunan tembakau.

Dahulu orang menamakan Tanah Deli mulai dari sungai ular (Deli Serdang) sampai ke sungai Wampu di Langkat sedangkan kesultanan Deli yang berkuasa saat itu wilayah kekuasannya tidak mencakup daerah di antara kedua sungai tersebut. Kediaman Sultan Deli disebut Kotamatsum dan pusat pemerintahan Kesultanan Deli disebut kota Maimun.

Bulan Maret 1864, Nienhuys yang merupakan pedagang tembakau asal Belanda, mengirim contoh tembakau hasil kebunnya ke Rotterdam, Belanda untuk diuji kualitasnya. Ternyata, daun tembakau itu dianggap berkualitas tinggi untuk bahan pembalut cerutu. Perjanjian tembakau ditandatangani oleh Belanda bersama Sultan Deli pada tahun 1865. Pada tahun 1869, Nienhuys memindahkan kantor pusat Deli Mij di Labuhan. Dengan perpindahan kantor tersebut, Medan dengan cepat menjadi pusat aktivitas pemerintahan dan perdagangan, sekaligus menjadi daerah yang paling mendominasi perkembangan di Indonesia bagian barat. Pesatnya perkembangan perekonomian mengubah Deli menjadi pusat

perdagangan yang mahsyur dengan julukan *het dollar land* atau tanah uang. Perkembangan Medan menjadi pusat perdagangan, telah mendorongnya menjadi pusat pemerintahan. Pada tahun 1879, Ibu Kota Asisten Residen Deli dipindahkan dari Labuhan ke Medan, 1 Maret 1887, Ibu Kota Residen Sumatra Timur dipindahkan pula dari Bengkalis ke Medan, Istana Kesultanan Deli yang semula berada dikampung Bahari (Labuhan) juga pindah dengan selesainya pembangunan Istana Maimoon pada tanggal 18 Mei 1891 dan dengan demikian Ibu Kota Deli telah resmi pindah ke Medan. Medan sebagai embrio sebuah kota secara kronologis berawal dari peristiwa penting tahun 1918, yaitu pada saat Medan menjadi Gemeente (kota administratif), akan tetapi tanpa memiliki Wali Kota sehingga wilayah tersebut tetap dibawah kewenangan penguasa Hindia Belanda. Kota administratif Medan dibentuk melalui lembaga bernama “komisi pengelola dana kotamadya”, yang dikenal dengan sebutan Negorijraad. Berdasarkan “Desentralisatie Wet Stbl 1903 No 329”, lembaga lain dibentuk yaitu “Afdeelingsraad Van Deli” yang berjalan bersama Negorijraad sampai dihapuskan “Afdeelingsraad Van Deli” yang berjalan bersama Negorijraad sampai dihapuskan Kota Medan. Maka, tanggal 1 April 1909 ini sempat dijadikan tanggal lahir kota Medan sampai dengan tahun 1975. Pimpinan Medan Municipal Board saat didirikan tanggal 1 April 1909 adalah Mr. EP Th Maier yang menjabat sebagai pembantu Residen Deli Serdang. Namun sejak 26 Maret 1975, lewat keputusan DPRD NO.4/DPRD/1975 yang didasari banyak pertimbangan, ditetapkan bahwa hari lahir Kota Medan adalah 1 Juli 1990.

## **2. Letak geografis**

Kota Medan terletak antara 2°.27'-2°.47' Lintang Utara dan 98°.35'-98°.44' Bujur Timur. Kota Medan 2,5-3,75 meter di atas permukaan laut. Kota Medan mempunyai iklim tropis dengan suhu minimum berkisar antara 23,0°C-24,1°C dan suhu maksimum berkisar antara 30,6°C-33,1°C serta pada malam hari berkisar 26°C-30,8°C. Selanjutnya mengenai kelembaban udara di wilayah Kota Medan rata-rata 78%-82%. Sebagian wilayah di Kota Medan sangat dekat dengan wilayah laut yaitu pantai Barat Belawan dan daerah pedalaman yang tergolong dataran tinggi, seperti Kabupaten Karo. Akibatnya suhu di Kota Medan menjadi tergolong panas. Kecepatan angin rata-rata sebesar 0,42 m/sec sedangkan rata-rata total laju penguapan tiap bulannya 100,6 mm.

Kota Medan memiliki luas 26.510 hektar (265,10 km<sup>2</sup>) atau 3,6% dari keseluruhan wilayah Sumatera Utara. Dengan demikian, dibandingkan dengan Kota/Kabupaten lainnya, Medan memiliki luas wilayah yang relatif kecil dengan jumlah penduduk yang relatif besar. Secara geografis kota Medan terletak pada 3° 30'-3° 43' Lintang Utara dan 98° 35'-98° 44' Bujur Timur. Untuk itu topografi Kota Medan cenderung miring ke utara dan berada pada ketinggian 2,5-37,5 meter di atas permukaan laut. Sesuai dengan dinamika pembangunan kota, luas wilayah administrasi Kota Medan telah melalui beberapa kali perkembangan. Pada Tahun 1951, Walikota Medan mengeluarkan Maklumat Nomor 21 tanggal 29 September 1951, yang menetapkan luas Kota Medan menjadi 5.130 Ha, meliputi 4 Kecamatan dengan 59 Kelurahan. Maklumat Walikota Medan dikeluarkan menyusul keluarnya Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 66/III/PSU tanggal 21 September 1951, agar daerah Kota Medan diperluas menjadi tiga kali

lipat. Sesuai dengan dinamika pembangunan kota, luas wilayah administrasi Kota Medan telah melalui beberapa kali perkembangan. Pada Tahun 1951, Walikota Medan mengeluarkan Maklumat Nomor 21 tanggal 29 September 1951, yang menetapkan luas Kota Medan menjadi 5.130 Ha, meliputi 4 Kecamatan dengan 59 Kelurahan. Maklumat Walikota Medan dikeluarkan menyusul keluarnya Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 66/III/PSU tanggal 21 September 1951, agar daerah Kota Medan diperluas menjadi tiga kali lipat. Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1973 Kota Medan kemudian mengalami pemekaran wilayah menjadi 26.510 Ha yang terdiri dari 11 Kecamatan dengan 116 Kelurahan.

Berdasarkan luas administrasi yang sama maka melalui Surat Persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor 140/2271/PUOD, tanggal 5 Mei 1986, Kota Medan melakukan pemekaran Kelurahan menjadi 144 Kelurahan. Perkembangan terakhir berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Utara Nomor 140.22/2772.K/1996 tanggal 30 September 1996 tentang pendefitipan 7 Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Medan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 1992 tentang Pembentukan Beberapa Kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Medan, secara administrasi Kota Medan dimekarkan kembali, dibagi atas 21 Kecamatan yang mencakup 151 Kelurahan, yakni :

- a. Medan Tuntungan dengan 9 Kelurahan
- b. Medan Johor dengan 6 Kelurahan
- c. Medan Amplas dengan 8 Kelurahan
- d. Medan Denai dengan 5 Kelurahan

- e. Medan Area dengan 12 Kelurahan
- f. Medan Kota dengan 12 Kelurahan
- g. Medan Maimun dengan 6 Kelurahan
- h. Medan Polonia dengan 5 Kelurahan
- i. Medan Baru dengan 6 Kelurahan
- j. Medan Selayang dengan 6 Kelurahan
- k. Medan Sunggal dengan 6 Kelurahan
- l. Medan Helvetia dengan 7 Kelurahan
- m. Medan Petisah dengan 7 Kelurahan
- n. Medan Barat dengan 6 Kelurahan
- o. Medan Timur dengan 11 Kelurahan
- p. Medan Perjuangan dengan 9 Kelurahan
- q. Medan Tembung dengan 7 Kelurahan
- r. Medan Deli dengan 6 Kelurahan
- s. Medan Labuhan dengan 7 Kelurahan
- t. Medan Marelan dengan 4 Kelurahan
- u. Medan Belawan dengan 6 Kelurahan

**Tabel 4.1 Batas wilayah Kota Medan**

<b>Utara</b>	<b>Selat malaka</b>
Selatan	Pancur Batu, Deli Tua (Kabupaten Deli Serdang)
Barat	Tanjung Morawa (Kabupaten Deli Serdang)
Timur	Kota Binjai, Hamparan Perak (Kabupaten Deli Serdang)

### **3. Keadaan Alam dan Penduduk Kota Medan**

Penduduk Kota Medan memiliki ciri penting yaitu yang meliputi unsur agama, suku etnis, budaya dan keragaman (plural) adat istiadat. Hal ini memunculkan karakter sebagian besar penduduk Kota Medan bersifat terbuka. Secara Demografi, Kota Medan pada saat ini juga sedang mengalami masa transisi demografi. Kondisi tersebut menunjukkan proses pergeseran dari suatu keadaan dimana tingkat kelahiran dan kematian tinggi menuju keadaan dimana tingkat kelahiran dan kematian semakin menurun. Berbagai faktor yang mempengaruhi proses penurunan tingkat kelahiran adalah perubahan pola fakir masyarakat dan perubahan sosial ekonominya. Di sisi lain adanya faktor perbaikan gizi, kesehatan yang memadai juga mempengaruhi tingkat kematian.

Koordinat geografis Kota Medan 3° 30'-3° 43' LU dan 98° 35'-98° 44' BT. Permukaan tanahnya cenderung miring ke Utara dan berada pada ketinggian 2,5-

37,5 m di atas permukaan laut. Secara umum ada 3 faktor utama yang mempengaruhi kinerja pembangunan kota, sebagai berikut :

- a. faktor geografis
- b. faktor demografis
- c. faktor sosial ekonomi

Ketiga faktor tersebut biasanya terkait satu dengan lainnya, yang secara simultan mempengaruhi daya guna dan hasil guna pembangunan kota termasuk pilihan-pilihan penanaman modal (investasi).

Sesuai dengan dinamika pembangunan kota, luas wilayah administrasi Kota Medan telah melalui beberapa kali perkembangan. Pada Tahun 1951, Walikota Medan mengeluarkan Maklumat Nomor 21 tanggal 29 September 1951, yang menetapkan luas Kota Medan menjadi 5.130 Ha, meliputi 4 Kecamatan dengan 59 Kelurahan. Maklumat Walikota Medan dikeluarkan menyusul keluarnya Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 66/III/PSU tanggal 21 September 1951, agar daerah Kota Medan diperluas menjadi tiga kali lipat. Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1973 Kota Medan kemudian mengalami pemekaran wilayah menjadi 26.510 Ha yang terdiri dari 11 Kecamatan dengan 116 Kelurahan.

Berdasarkan luas administrasi yang sama maka melalui Surat Persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor 140/2271/PUOD, tanggal 5 Mei 1986, Kota Medan melakukan pemekaran Kelurahan menjadi 144 Kelurahan. Perkembangan terakhir berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Utara Nomor 140.22/2772.K/1996 tanggal 30 September 1996 tentang penetapan 7 Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Medan berdasarkan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 35 tahun 1992 tentang Pembentukan Beberapa Kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Medan, secara administrasi Kota Medan dimekarkan kembali, dibagi atas 21 Kecamatan yang mencakup 151 Kelurahan. Berdasarkan perkembangan administratif ini Kota Medan kemudian tumbuh secara geografis, demografis dan sosial ekonomis.

Secara administratif, wilayah Kota Medan hampir secara keseluruhan berbatasan dengan Daerah Kabupaten Deli Serdang, yaitu sebelah Barat, Selatan dan Timur. Sepanjang wilayah Utara nya berbatasan langsung dengan Selat Malaka, yang diketahui merupakan salah satu jalur lalu lintas terpadat di dunia. Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu daerah yang kaya dengan Sumber Daya alam (SDA), Khususnya di bidang perkebunan dan kehutanan. Karenanya secara geografis Kota Medan didukung oleh daerah-daerah yang kaya Sumber daya alam seperti Deli Serdang, Labuhan Batu, Simalungun, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Karo, Binjai dan lain-lain.

Kondisi ini menjadikan kota Medan secara ekonomi mampu mengembangkan berbagai kerjasama dan kemitraan yang sejajar, saling menguntungkan, saling memperkuat dengan daerah-daerah sekitarnya. Di samping itu sebagai daerah yang pada pinggiran jalur pelayaran Selat Malaka, maka Kota Medan memiliki posisi strategis sebagai gerbang (pintu masuk) kegiatan perdagangan barang dan jasa, baik perdagangan domestik maupun kuar negeri (ekspor-impor). Posisi geografis Kota Medan ini telah mendorong perkembangan kota dalam 2 kutub pertumbuhan secara fisik , yaitu daerah terbangun Belawan dan pusat Kota Medan saat ini.

#### 4. Sarana Prasarana Kota Medan

##### a. Fasilitas Pendidikan

Tingkat suatu produktivitas dan kompetensi seseorang sangatlah ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil yang diikuti dengan rasa percaya diri seseorang serta sikap dan perilaku yang inovatif. Berdasarkan data pemerintah Kota Medan pada tahun 2010 sampai 2017 jumlah fasilitas bidang pendidikan adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.2 Jumlah Fasilitas Pendidikan**

<b>Tingkat Sekolah</b>	<b>Negeri</b>	<b>Swasta</b>	<b>Jumlah</b>
SD	383	472	855
SMP	49	351	400
SMA	21	190	211
SMK	13	147	160

*Sumber : Dinas Pendidikan Kota Medan*

##### b. Fasilitas Kesehatan

Dalam meningkatkan fasilitas bidang kesehatan didalam mengatasi masalah kesehatan maka Kota Medan selalu meningkatkan pelayanan dengan berbagai upaya dalam pengadaan sarana dan prasarana kesehatan pada tahun 2010 sampai tahun 2017 diantaranya yaitu, rumah sakit, rumah bersalin, puskesmas, posyandu, klinik/balai kesehatan, pustu (pusat kesehatan masyarakat pembantu).

**Tabel 4.3 Jumlah Fasilitas Kesehatan**

<b>Tahun</b>	<b>Rumah Sakit</b>	<b>Rumah Bersalin</b>	<b>Puskesmas</b>	<b>Posyandu</b>	<b>Klinik/Balai Kesehatan</b>	<b>Pustu</b>	<b>Jumlah</b>
2010	76	117	39	1.406	349	41	2.028
2011	75	175	39	1.406	357	41	2.093
2012	77	128	39	1.396	699	41	2.380
2013	78	117	39	1.396	747	41	2.418
2014	79	117	39	1.396	747	41	2.419
2015	79	117	39	1.390	747	41	2.419
2016	79	117	39	1.390	747	41	2.419
2017	79	117	39	1.390	747	41	2.419

*Sumber : Dinas Kesehatan Kota Medan*

### **c. Fasilitas Infrastruktur**

Dalam upaya membangun dan memelihara infrastruktur untuk meningkatkan sistem kehidupan ekonomi dan sistem sosial masyarakat maka pemerintah Kota Medan selalu meningkatkan berbagai upaya dalam pengadaan fasilitas sarana infrastruktur pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 yang ada seperti jembatan, jalan umum dan infrastruktur lainnya.

**Tabel 4.4 Prasarana Jalan Kota Medan**

**Berdasarkan Kondisi (km)**

<b>Tahun</b>	<b>Baik</b>	<b>Sedang</b>	<b>Rusak</b>	<b>Rusak Berat</b>	<b>Jumlah</b>
2010	2 085,31	397,80	113,80	1,30	2 598,21
2011	2 980,20	15,80	20,10	1,30	3 017,40
2012	2 609,10	12,09	18,20	1,30	2 640,69
2013	2 863,38	80,50	240,72	94,90	2 894,69
2014	2 956,71	177,49	113,80	38,69	3 306,69
2015	2 993,87	23,93	113,47	148,23	3 279,5
2016	2 810,40	15,80	20,10	171,10	3 017,4
2017	1 874,11	973,55	352,85	79,00	3 279,51

*Sumber : Dinas Bina Marga Kota Medan*

**Tabel 4.5 Prasarana Jalan Kota Medan**  
**Berdasarkan Jenis Permukaan Jalan (km)**

<b>Tahun</b>	<b>Aspal</b>	<b>Beton</b>	<b>Tanah</b>	<b>Jumlah</b>
2010	2 548,89	0,00	8,95	2 557,84
2011	2 671,60	0,00	58,10	2 729,7
2012	2 798,40	0,00	61,20	2 859,6
2013	3 184,60	0,00	94,90	3 279,5
2014	3 141,81	0,00	63,20	3 205,01
2015	3 141,81	0,00	63,20	3 205,01
2016	2 497,50	461,80	58,10	2 959,3
2017	2 363,34	802,49	0,00	3 165,83

*Sumber : Dinas Bina Marga Kota Medan*

## **B. Gambaran Hasil Penelitian**

Penelitian ini menganalisis belanja daerah sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap indeks pembangunan manusia dan produktivitas tenaga kerja di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Data yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan data Time Series atau rentang waktu mulai dari tahun 2010 sampai tahun 2017. Alat pengolah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat lunak (software) computer SPSS 16 dengan metode Path Analysis (Jalur Analisis). Oleh sebab itu, perlu dilihat bagaimana gambaran perkembangan secara umum dari analisis belanja daerah sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap indeks pembangunan manusia dan

produktivitas tenaga kerja yang terjadi di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dari tahun ke tahun.

### **1. Pengeluaran Pemerintah**

Pengeluaran pemerintah merupakan pembelanjaan yang harus dilakukan oleh pemerintah terhadap barang dan jasa. Pengeluaran pemerintah atau belanja pemerintah harus fokus dengan kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melalui peningkatan pelayanan publik. Kota Medan sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara memiliki pengeluaran pemerintah daerah yang sangat besar jumlahnya. Pengeluaran pemerintah tersebut berupa belanja langsung dan belanja tidak langsung. Adapun total pengeluaran pemerintah daerah Kota Medan mulai dari tahun 2010 sampai tahun 2017 sebagai berikut :

**Tabel 4.6 Total Pengeluaran Pemerintah Kota Medan  
Tahun 2010-2017 (Dalam Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Total Belanja Daerah</b>
2010	2.582.065.326.653,00
2011	3.395.728.853.449,00
2012	4.080.935.662.619,00
2013	4.237.560.638.891,00
2014	4.625.169.942.881,00
2015	5.467.952.757.114,00
2016	5.737.738.289.895,00
2017	5.554.084.308.979,40

*Sumber : pengelola keuangan dan aset daerah Kota Medan*

Dari tabel 4.7 di atas terlihat bahwa pengeluaran pemerintah Kota Medan dari tahun 2010 sampai tahun 2017 selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2010 total pengeluaran sebesar Rp. 2.582.065.326.653,00 Pada tahun 2017 mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu sebesar Rp. 5.554.084.308.979,40. Adanya pengeluaran pemerintah yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Medan agar pengeluaran dananya digunakan pembangunan yang betul-betul membangun untuk masyarakat agar masyarakat merasakannya dalam pembangunan yang ada.

## **2. Belanja Pemerintah Daerah Sektor Pendidikan**

Belanja daerah sektor pendidikan merupakan bagian dari belanja daerah dengan tujuan untuk meningkatkan *Output* dari bidang pendidikan. Tingginya anggaran sektor pendidikan serta pengelolaan yang tepat sasaran dan efektif maka realisasi belanja daerah bidang pendidikan tentunya akan meningkat dengan baik dan bahkan terasa kepada tingkat pendidikan masyarakat. Belanja sektor pendidikan diukur dengan menggunakan realisasi APBD menurut bidang pendidikan dalam satuan rupiah. Adapun total realisasi belanja daerah Pemerintah Kota Medan sektor pendidikan dari tahun 2010 sampai tahun 2017 sebagai berikut :

**Tabel 4.7 Total Realisasi Belanja Daerah Sektor Pendidikan**

**Kota Medan Tahun 2010-2017 (Dalam Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Sektor Pendidikan</b>
2010	733.266.652.917,00
2011	983.774.581.356,00
2012	983.289.538.550,00
2013	1.109.133.107.469,00
2014	1.079.853.934.544,00
2015	1.162.361.929.743,00
2016	1.195.515.428.591,00
2017	883.069.743.930,00

*Sumber : pengelola keuangan dan aset daerah Kota Medan*

### **3. Belanja Daerah Pemerintah Sektor Kesehatan**

Belanja daerah sektor kesehatan merupakan bagian dari belanja daerah dengan tujuan untuk meningkatkan *Output* dari bidang kesehatan. Tingginya anggaran sektor kesehatan serta pengelolaan yang tepat sasaran dan efektif maka realisasi belanja daerah bidang kesehatan tentunya akan meningkat dengan baik pula dan bahkan terasa kepada tingkat kesehatan kepada masyarakat. Belanja sektor kesehatan diukur dengan menggunakan realisasi APBD menurut bidang kesehatan dalam satuan rupiah. Adapun total realisasi belanja daerah Pemerintah Kota Medan sektor kesehatan dari tahun 2010 sampai tahun 2017 sebagai berikut :

**Tabel 4.8 Total Realisasi Belanja Daerah Sektor Kesehatan  
Kota Medan Tahun 2010-2017 (Dalam Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Sektor Kesehatan</b>
2010	294.671.898.434,58
2011	373.568.879.990,22
2012	423.878.270.895,25
2013	389.133.311.196,48
2014	495.610.513.080,28
2015	627.008.258.405,00
2016	691.863.259.661,01
2017	615.211.142.256,00

*Sumber : pengelola keuangan dan aset daerah Kota Medan*

#### **4. Belanja Daerah Pemerintah Sektor Infrastruktur**

Belanja daerah sektor infrastruktur merupakan bagian dari belanja daerah dengan tujuan untuk meningkatkan *Output* dari bidang infrastruktur. Tingginya anggaran sektor infrastruktur serta pengelolaan yang tepat sasaran dan efektif maka realisasi belanja daerah bidang infrastruktur tentunya akan meningkat dengan baik dan bahkan terasa manfaatnya kepada masyarakat agar laju perekonomian masyarakat akan lebih lancar. Belanja sektor infrastruktur diukur dengan menggunakan realisasi APBD menurut bidang infrastruktur dalam satuan rupiah. Adapun total realisasi belanja daerah Pemerintah Kota Medan sektor infrastruktur dari tahun 2010 sampai tahun 2017 sebagai berikut :

**Tabel 4.9 Total Realisasi Belanja Daerah Sektor Infrastruktur  
Kota Medan Tahun 2010-2017 (Dalam Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Sektor Infrastruktur</b>
2010	894.447.095.338,91
2011	1.276.292.315.813,11
2012	1.210.637.409.110,42
2013	1.239.130.487.061,16
2014	1.162.369.583.640,77
2015	1.941.167.065.109,17
2016	1.973.444.225.304,52
2017	2.206.708.786.843,31

*Sumber : pengelola keuangan dan aset daerah Kota Medan*

### **C. Hasil Analisis Data**

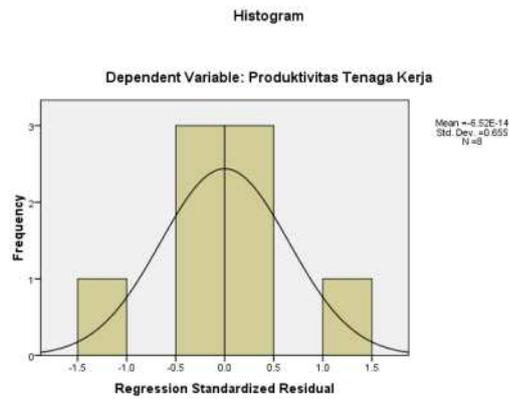
#### **1. Hasil Pengujian Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-benar layak digunakan atau tidak. Data yang diperoleh dari data sekunder secara time series, selanjutnya akan diuji dengan uji asumsi klasik sebagai berikut :

##### **a. Uji Normalitas Data**

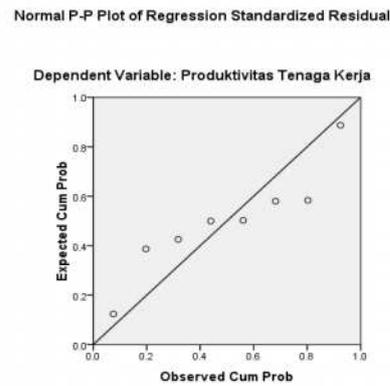
Dalam penelitian ini pengujian normalitas dideteksi melalui analisa grafik histogram dan normal P-P Plot yang dihasilkan SPSS sebagai berikut:

**Gambar 4.1 Histogram Produktivitas Tenaga Kerja**



*Sumber : Data diolah SPSS 16*

**Gambar 4.2 P-Plot Produktivitas Tenaga Kerja**



*Sumber : Data diolah SPSS 16*

Dari hasil analisis diatas terlihat bahwa grafik histogram menunjukkan kecembungan seimbang ditengah dan grafik PP-Plot menunjukkan titik-titik data berada disekitar garis diagonal maka data dinyatakan berdistribusi normal.

### **b. Uji Multikolinieritas Data**

Uji Multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Data yang baik jika terbebas dari masalah multikolinieritas. Hasil uji Multikolinieritas sebagai berikut:

**Tabel 4.10 Coefficients<sup>a</sup>**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)	-3846.794	733.909		-5.242	.014					
Sektor Pendidikan	-.012	.009	-.095	1.451	.243	-.385	-.642	-.080	.701	1.427
Sektor Kesehatan	.123	.072	.277	1.707	.186	.950	.702	.094	.114	8.747
Sektor Infrastruktur	.032	.013	.157	2.370	.099	-.443	.807	.130	.686	1.458
Indeks Pembangunan Manusia	50.242	9.786	.780	5.134	.014	.975	.948	.282	.130	7.682

a. Dependent Variable: Produktivitas Tenaga Kerja

Sumber : Data diolah SPSS 16

Hasil uji Multikolinieritas diketahui bahwa nilai *tolarance* dan VIF pada tabel diatas menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini tidak mengalami multikolinieritas. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *tolarance* yang besarnya jauh melebihi angka 0,1 dan VIF variabel tersebut yang besarnya kurang dari 10.

**c. Uji Autokorelasi Data**

Dalam penelitian ini pengujian multikolinieritas dideteksi melalui dengan analisa nilai Durbin Watson yang dihasilkan oleh output SPSS sebagai berikut:

**Tabel 4.11 Model Summary<sup>b</sup>**

Model Summary <sup>b</sup>										
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.995 <sup>a</sup>	.991	.979	9.19905	.991	82.362	4	3	.002	2.908

a. Predictors: (Constant), Indeks Pembangunan Manusia, Sektor Pendidikan, Sektor Infrastruktur, Sektor Kesehatan

b. Dependent Variable: Produktivitas Tenaga Kerja

Sumber : Data diolah SPSS 16

Hasil Uji Autokorelasi diatas menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson berada diantara 1 sampai 3 yaitu sebesar 2.908 maka data dinyatakan lulus dari uji autokorelasi. Dengan demikian data valid dan dapat dilakukan analisis selanjutnya.

## 2. Hasil Analisis Path Analysis

Path Analysis atau analisis jalur terbagi dalam analisis pengaruh langsung dan analisis tidak langsung. Jika pengaruh langsung lebih besar dibandingkan dengan pengaruh tidak langsung, maka variabel intervening kurang berperan dan sebaliknya.

Hasil Persamaan 1  $Y_1 = P_1Y_1X_1 + e$

**Tabel 4.12 Model Summary**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.266 <sup>a</sup>	.071	-.084	1.02539

a. Predictors: (Constant), Sektor Pendidikan

Sumber : Data diolah SPSS 16

**Tabel 4.13 Model Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	1 (Constant)	78.591	.510		
Sektor Pendidikan	.000	.001	<b>-.266</b>	-6.75	.525

a. Dependent Variable: Produktivitas Tenaga

Kerja

Sumber : Data diolah SPSS 16

**Hasil Persamaan 2  $Y_1 = P_2Y_1X_2 + e$**

**Tabel 4.14 Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.920 <sup>a</sup>	<b>.847</b>	.821	.41636

a. Predictors: (Constant), Sektor Kesehatan

Sumber : Data diolah SPSS 16

**Tabel 4.15 Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	1 (Constant)	75.233	.561		
Sektor Kesehatan	.006	.001	<b>.920</b>	5.758	.001

a. Dependent Variable: Produktivitas Tenaga

Kerja

Sumber : Data diolah SPSS 16

**Hasil Persamaan 3  $Y1 = P3Y1X3 + e$**

**Tabel 4.16 Model Summary**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.544 <sup>a</sup>	.296	.179	.89234

a. Predictors: (Constant), Sektor Infrastruktur

Sumber : Data diolah SPSS 16

**Tabel 4.17 Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Coefficients <sup>a</sup>				t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Beta		
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	78.541	.338		232.458	.000	
Sektor Infrastruktur	-.002	.001	-.544	-1.589	.163	

a. Dependent Variable: Produktivitas Tenaga Kerja

Sumber : Data diolah SPSS 16

**Hasil Persamaan 4  $Y2 = P4Y2X2 + P4Y2Y1 + e$**

**Tabel 4.18 Model Summary**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.984 <sup>a</sup>	.968	.955	13.47174

a. Predictors: (Constant), Indeks Pembangunan Manusia, Sektor Pendidikan

Sumber : Data diolah SPSS 16

**Tabel 4.19 Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	1 (Constant)	-4581.456	421.584		
Sektor Pendidikan	-.018	.011	<b>-.135</b>	-1.621	.166
Indeks Pembangunan Manusia	60.465	5.364	<b>.939</b>	11.273	.000

a. Dependent Variable: Produktivitas  
Tenaga Kerja

Sumber : Data diolah SPSS 16

$$\text{Hasil Persamaan 5 Y2} = \text{P5Y2X2} + \text{P5Y2Y1} + e$$

**Tabel 4.20 Model Summary**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.984 <sup>a</sup>	<b>.969</b>	.956	13.28187

a. Predictors: (Constant), Indeks Pembangunan Manusia, Sektor Kesehatan

Sumber : Data diolah SPSS 16

**Tabel 4.21 Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	1 (Constant)	-3260.720	979.934		
Sektor Kesehatan	.152	.090	<b>.341</b>	1.687	.152
Indeks Pembangunan Manusia	42.557	13.023	<b>.661</b>	3.268	.022

a. Dependent Variable: Produktivitas Tenaga Kerja

Sumber : Data diolah SPSS 16

Hasil Persamaan  $6 Y_2 = P_6Y_2 + P_6Y_2Y_1 + e$

**Tabel 4.22 Model Summary**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.981 <sup>a</sup>	.962	.946	14.67411

a. Predictors: (Constant), Indeks Pembangunan Manusia, Sektor Infrastruktur

Sumber : Data diolah SPSS 16

**Tabel 4.23 Coefficients<sup>a</sup>**

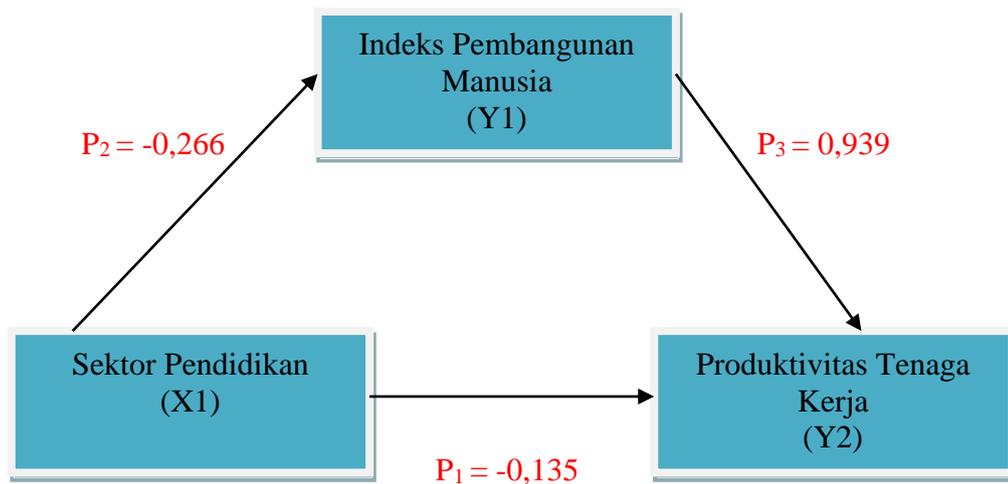
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-5115.238	527.309		-9.701	.000
Sektor Infrastruktur	.025	.021	.125	1.195	.286
Indeks Pembangunan Manusia	67.140	6.713	1.043	10.001	.000

a. Dependent Variable: Produktivitas Tenaga Kerja

Sumber : Data diolah SPSS 16

#### D. Interpretasi Hasil Path Analysis

##### 1. Pengaruh Belanja Daerah Sektor Pendidikan Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Melalui Indeks Pembangunan Manusia Sebagai Variabel Intervening.



Berdasarkan gambar di atas, hasil analisis jalur menunjukkan bahwa Sektor Pendidikan dapat berpengaruh langsung terhadap Produktivitas Tenaga Kerja dan dapat juga berpengaruh tidak langsung yaitu dari pengaruh Sektor Pendidikan ke Indeks Pembangunan Manusia (sebagai variabel intervening) lalu ke Produktivitas Tenaga Kerja.

- Besarnya Pengaruh **langsung** Sektor Pendidikan terhadap Produktivitas Tenaga Kerja ( $P_1$ ) = -0,135
- Besarnya pengaruh **tidak langsung** Sektor Pendidikan terhadap Produktivitas Tenaga Kerja melalui Indeks Pembangunan Manusia yaitu ( $P_2 \times P_3$ )  $(-0,266 \times 0,939) = -0,249$
- Besarnya pengaruh **total sebagai pengaruh mediasi** Sektor Pendidikan terhadap Produktivitas Tenaga Kerja melalui Indeks Pembangunan

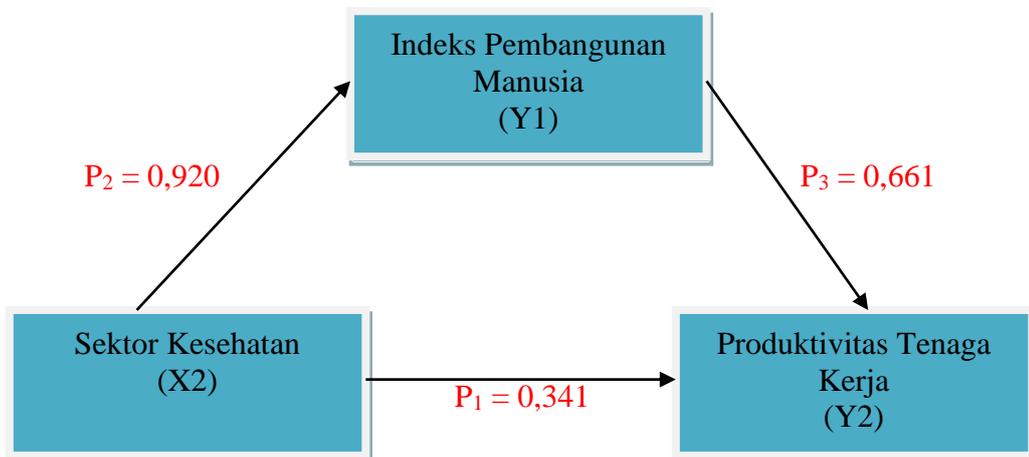
Manusia (pengaruh langsung + pengaruh tidak langsung) =  $-0,135 + (-0,249) = -0,384$

- Kesimpulan nilai **total sebagai pengaruh mediasi** lebih besar dari nilai pengaruh **langsung** dan **pengaruh tidak langsung**.

**Hasil perhitungan yang didapat menunjukkan :**

Nilai pengaruh langsung ( $P_1$ ) =  $-0,135$  lebih kecil dari nilai pengaruh tidak langsung ( $P_2 \times P_3$ ) =  $-0,384$ , maka  $H_a$  diterima, artinya Sektor pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas Tenaga Kerja melalui Indeks pembangunan Manusia sebagai variabel intervening. Atau dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia menjadi variabel yang memediasi/intervening antara Sektor Pendidikan terhadap Produktivitas Tenaga Kerja, maka Indeks Pembangunan Manusia berfungsi sebagai variabel intervening.

**2. Pengaruh Belanja Daerah Sektor Kesehatan Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Melalui Indeks Pembangunan Manusia Sebagai Variabel Intervening.**



Berdasarkan gambar di atas, hasil analisis jalur menunjukkan bahwa Sektor Kesehatan dapat berpengaruh langsung terhadap Produktivitas Tenaga Kerja dan dapat juga berpengaruh tidak langsung yaitu dari pengaruh Sektor Kesehatan ke Indeks Pembangunan Manusia (sebagai variabel intervening) lalu ke Produktivitas Tenaga Kerja.

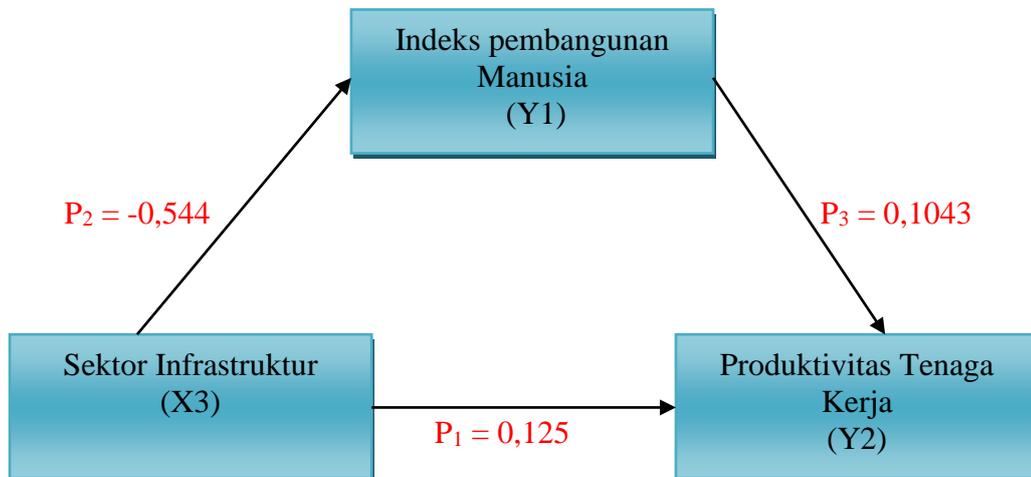
- Besarnya Pengaruh **langsung** Sektor Kesehatan terhadap Produktivitas Tenaga Kerja ( $P1$ ) = 0,341
- Besarnya pengaruh **tidak langsung** Sektor kesehatan terhadap Produktivitas Tenaga Kerja melalui Indeks Pembangunan Manusia yaitu ( $P2 \times P3$ ) ( $0,920 \times 0,661$ ) = 0,608
- Besarnya pengaruh **total sebagai pengaruh mediasi** Sektor Kesehatan terhadap Produktivitas Tenaga Kerja melalui Indeks Pembangunan Manusia (pengaruh langsung + pengaruh tidak langsung) =  $0,341 + 0,608 = 0,949$
- Kesimpulan nilai **total sebagai pengaruh mediasi** lebih besar dari nilai pengaruh **langsung** dan **pengaruh tidak langsung**.

#### **Hasil perhitungan yang didapat menunjukkan :**

Nilai pengaruh langsung ( $P1$ ) = 0,341 lebih kecil dari nilai pengaruh tidak langsung ( $P2 \times P3$ ) = 0,608, maka  $H_0$  diterima, artinya Sektor Kesehatan berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas Tenaga Kerja melalui Indeks pembangunan Manusia sebagai variabel intervening. Atau dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia menjadi variabel yang

memediasi/intervening antara Sektor Kesehatan terhadap Produktivitas Tenaga Kerja, maka Indeks Pembangunan Manusia berfungsi sebagai variabel intervening.

### 3. Pengaruh Belanja Daerah Sektor Infrastruktur Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Melalui Indeks Pembangunan Manusia Sebagai Variabel Intervening.



Berdasarkan gambar di atas, hasil analisis jalur menunjukkan bahwa Sektor Infrastruktur dapat berpengaruh langsung terhadap Produktivitas Tenaga Kerja dan dapat juga berpengaruh tidak langsung yaitu dari pengaruh Sektor Infrastruktur ke Indeks Pembangunan Manusia (sebagai variabel intervening) lalu ke Produktivitas Tenaga Kerja.

- Besarnya Pengaruh **langsung** Sektor Infrastruktur terhadap Produktivitas Tenaga Kerja ( $P_1$ ) = 0,125
- Besarnya pengaruh **tidak langsung** Sektor Infrastruktur terhadap Produktivitas Tenaga Kerja melalui Indeks Pembangunan Manusia yaitu ( $P_2 \times P_3$ )  $(-0,544 \times 0,1043) = -0,056$

- Besarnya pengaruh **total sebagai pengaruh mediasi** Sektor Infrastruktur terhadap Produktivitas Tenaga Kerja melalui Indeks Pembangunan Manusia (pengaruh langsung + pengaruh tidak langsung) =  $0,125 + (-0,056) = 0,069$
- Kesimpulan nilai **total sebagai pengaruh mediasi** lebih besar dari nilai pengaruh **langsung** dan **pengaruh tidak langsung**.

**Hasil perhitungan yang didapat menunjukkan :**

Nilai pengaruh langsung ( $P1$ ) = 0,125 lebih besar dari nilai pengaruh tidak langsung ( $P2 \times P3$ ) = -0,056, maka  $H_0$  ditolak, artinya Sektor Infrastruktur tidak berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas Tenaga Kerja melalui Indeks pembangunan Manusia sebagai variabel intervening. Atau dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia tidak menjadi variabel yang memediasi/intervening antara Sektor Infrastruktur terhadap Produktivitas Tenaga Kerja, maka Indeks Pembangunan Manusia tidak berfungsi sebagai variabel intervening.

**E. Pembahasan**

**1. Pengaruh Belanja Daerah Sektor Pendidikan Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Melalui Indeks Pembangunan Manusia Sebagai Variabel Intervening.**

Pendidikan merupakan salah satu tonggak dalam suatu perekonomian, dengan melalui sistem pendidikan akan menjadi sumber daya manusia yang

berkualitas dan dapat terbentuk dengan baik. Pemerintah sangat berperan penting atas dalam suatu pembangunan, salah satunya seperti pembangunan manusia dan meningkatkan produktivitas yang dapat di bentuk melalui dengan adanya pendidikan.

Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan uji interpretasi path analysis pada variabel belanja daerah sektor pendidikan berpengaruh signifikan sebesar -0,135 atau pengaruh langsung (P1) lebih kecil dari nilai pengaruh tidak langsung (P2 x P3) sebesar -0,384, sehingga dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa  $H_0$  diterima  $H_0$  ditolak. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa belanja daerah sektor pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja melalui indeks pembangunan manusia di Kota Medan selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2017.

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa pengaruh Sektor Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas Tenaga Kerja melalui Indeks Pembangunan Manusia di Kota Medan tahun 2010 sampai dengan tahun 2017. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Devyanti Patta (2012), menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Pemerintah harus menempatkan pendidikan sebagai faktor penting dalam menunjang dalam pembangunan suatu daerah. Hal tersebut terlihat dari besarnya pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan. Pemerintah menyediakan anggaran minimal 20% dari total belanja daerah untuk bidang pendidikan. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem

Pendidikan Nasional Pasal 49 mengamanatkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidikan dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bahwa anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pada sektor pendidikan terealisasi dengan tepat sasaran hal ini terlihat dari karena lebih 20% dari total belanja daerah di sektor pendidikan.

Berharap belanja daerah Kota Medan sektor pendidikan dapat lebih diperhatikan dengan baik agar mampu terealisasikan disemua bagian sektor pendidikan sehingga dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan indeks pembangunan manusia di Kota Medan.

## **2. Pengaruh Belanja Daerah Sektor Kesehatan Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Melalui Indeks Pembangunan Manusia Sebagai Variabel Intervening.**

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan, dengan keadaan badan yang sehat manusia bisa melakukan beraktivitas dengan bebas. Dalam semua kebutuhan hidup manusia harus memiliki stamina yang sehat agar produktivitas seseorang tidak akan terganggu, oleh sebab itu kesehatan merupakan hal yang tidak lepas dari pola hidup manusia itu sendiri. Pemerintah sangat berperan penting atas kebijakan yang seharusnya memperhatikan salah satu hal dalam suatu pembangunan manusia yakni seperti kesehatan, oleh sebab itu pemerintah harus memperhatikannya dengan serius melalui alokasi anggaran pada sektor kesehatan.

Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan uji interpretasi path analysis pada variabel belanja daerah sektor kesehatan berpengaruh signifikan sebesar 0,341 atau pengaruh langsung (P1) lebih kecil dari nilai pengaruh tidak langsung (P2 x P3) sebesar 0,608, sehingga dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa  $H_a$  diterima  $H_o$  ditolak. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa belanja daerah sektor kesehatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja melalui indeks pembangunan manusia di Kota Medan selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2017.

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa pengaruh Sektor Kesehatan berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas Tenaga Kerja melalui Indeks Pembangunan Manusia di Kota Medan tahun 2010 sampai dengan tahun 2017. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Razmi (2012), menunjukkan bahwa peningkatan kesehatan dapat meningkatkan produktivitas dan pasokan tenaga kerja.

Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Mengenai Anggaran Kesehatan menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah pusat dialokasikan minimal 5% dari APBN di luar gaji, sedangkan besar anggaran kesehatan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10% dari APBD di luar gaji. Bahwa anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pada sektor kesehatan terealisasi dengan tepat sasaran hal ini terlihat dari karena lebih 10% dari total belanja daerah di sektor kesehatan. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan mempunyai satu tujuan, yakni untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,

yang dapat diukur melalui penurunan angka kematian anak bayi, penurunan angka kematian dibawah umur 5 tahun, dan akan meningkatkan angka harapan hidup. Keseriusan pemerintah daerah Kota Medan terhadap masalah pada kesehatan terlihat dalam pengalokasian anggaran yang ada.

Berharap belanja daerah Kota Medan sektor kesehatan dapat lebih diperhatikan dengan baik agar mampu terealisasikan disemua bagian sektor kesehatan sehingga dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan indeks pembangunan manusia di Kota Medan.

### **3. Pengaruh Belanja Daerah Sektor Infrastruktur Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Melalui Indeks Pembangunan Manusia Sebagai Variabel Intervening.**

Infrastruktur merupakan investasi penunjang yang akan menjadikan salah satu faktor penentu suatu pembangunan ekonomi. Pembangunan infrastruktur diyakini akan mampu menggerakkan sektor rill, menyerap tenaga kerja, meningkatkan konsumsi masyarakat itu sendiri, dan serta memicu akan terjadinya kegiatan produksi. Keberadaan infrastruktur sangatlah penting, maka pembangunan infrastruktur layak mendapatkan prioritas dalam suatu pembangunan, agar laju perekonomian masyarakat lancar dengan baik tanpa mengeluarkan biaya transportasi yang lebih mahal.

Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan uji interprestasi path analysis pada variabel belanja daerah sektor infrastruktur tidak berpengaruh signifikan sebesar 0,125 atau pengaruh langsung (P1) lebih besar dari nilai pengaruh tidak langsung (P2 x P3) sebesar -0,056, sehingga dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa  $H_a$  ditolak  $H_o$  diterima. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa belanja

daerah sektor infrastruktur memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja melalui indeks pembangunan manusia di Kota Medan selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2017.

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa pengaruh Sektor Infrastruktur tidak berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas Tenaga Kerja melalui Indeks Pembangunan Manusia di Kota Medan tahun 2010 sampai dengan tahun 2017. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Widodo, Waridin dan Maria (2012 : 2), menunjukkan bahwa pembangunan manusia merupakan salah satu indikator bagi kemajuan suatu negara. Jadi kesimpulannya bahwa anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pada sektor infrastruktur tidak berpengaruh terhadap pada produktivitas tenaga kerja dan indeks pembangunan manusia. Seberapa besarpun anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Medan tetap saja tidak mempengaruhi oleh produktivitas tenaga kerja dan indeks pembangunan manusia.

Namun jika pengeluaran pemerintah saja tidaklah cukup diperlukan oleh peran pihak swasta. Peran pemerintah untuk meningkatkan perhatian kepada pihak swasta adalah bagian dari bantuan pembebasan lahan, subsidi operasional, dan jaminan resiko usaha. Peningkatan belanja daerah sektor infrastruktur juga harus diperhatikan dengan efektivitas dan efesiensi dari pengeluaran tersebut. Hal tersebut supaya dilakukan agar meningkatkan kualitas infrastruktur yang dibangun dan terciptanya transparansi dalam proses pengadaan barang dan pemabangunan. Semakin tinggi tingkat kualitas bidang infrastruktur yang dibangun maka akan meningkatkan produktivitas dan indeks pembangunan manusia.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah dijelaskan maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Belanja Daerah Sektor Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas Tenaga Kerja melalui Indeks Pembangunan Manusia dengan nilai pengaruh langsung lebih kecil sebesar -0,135 dari nilai pengaruh tidak langsung sebesar -0,384 yang artinya jika Belanja Daerah Kota Medan Sektor Pendidikan meningkat, maka mampu menaikkan Produktivitas Tenaga Kerja dan Indeks Pembangunan Manusia di Kota Medan.
2. Belanja Daerah Sektor Kesehatan berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas Tenaga Kerja melalui Indeks Pembangunan Manusia dengan nilai pengaruh langsung sebesar 0,341 dari nilai pengaruh tidak langsung sebesar 0,608 yang artinya jika Belanja Daerah Kota Medan Sektor Kesehatan meningkat, maka mampu menaikkan Produktivitas Tenaga Kerja dan Indeks Pembangunan Manusia di Kota Medan.
3. Belanja Daerah Sektor Infrastruktur tidak berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas Tenaga Kerja melalui Indeks Pembangunan Manusia dengan nilai pengaruh langsung sebesar 0,125 dari nilai pengaruh tidak langsung sebesar -0,056 yang artinya jika Belanja Daerah Kota Medan Sektor Infrastruktur menurun, maka tidak mampu menaikkan

Produktivitas Tenaga Kerja dan Indeks Pembangunan Manusia di Kota Medan.

4. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produktivitas Tenaga Kerja di Kota Medan, artinya peningkatan IPM akan secara langsung menaikkan Produktivitas Tenaga Kerja di Kota Medan secara signifikan. Sebab dalam IPM terhadap indeks harapan hidup, indeks pendidikan dan indeks kelayakan hidup, sehingga IPM adalah salah satu indikator mengapa sebuah kota dapat meningkatkan SDM yang baik.
5. Pengeluaran Pemerintah daerah atas Pendidikan dan Kesehatan secara Analisis Jalur berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas Tenaga Kerja melalui Indeks Pembangunan Manusia.
6. Pengeluaran Pemerintah daerah atas Infrastruktur secara Analisis Jalur tidak berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Melalui Indeks Pembangunan Manusia.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka adapun beberapa saran yang diajukan oleh peneliti sebagai berikut :

1. Pemerintah harus dapat menetapkan kebijakan-kebijakan agar Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas Tenaga Kerja dan melalui Indeks Pembangunan Manusia.

2. Pemerintah harus dapat meningkatkan pengeluaran Belanja Daerah Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur berharap Pemerintah mengalokasikan pengeluaran Belanja Daerah secara merata.
3. Untuk Pemerintah Kota Medan di harapkan mampu meningkatkan sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur di tahun yang akan datang.
4. Untuk Pemerintah Kota Medan yang akan datang dituntut lebih meningkatkan komitmennya dalam memenuhi kebutuhan pelayanan pendidikan yang baik bagi masyarakat, melalui pengalokasian anggaran pembangunan pendidikan yang besar lagi. Alokasi anggaran pendidikan hendaknya lebih banyak digunakan untuk meningkatkan kapasitas para pendidik guna meningkatkan mutu pendidikan di Kota Medan.
5. Untuk Pemerintah Kota Medan hendaknya dapat meningkatkan lagi anggaran belanja daerah sektor kesehatan agar masyarakat dapat merasakan dampak dari fasilitas pelayanan kesehatan Publik berupa tenaga kesehatan yang profesional didukung oleh infrastruktur berupa rumah sakit dan puskesmas.
6. Kepada peneliti selanjutnya supaya melanjutkan penelitian dengan menambah jumlah variabel dan rentang waktu penelitian agar memperoleh hasil yang lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abjan. 2016. Determinasi Anggaran Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal*. Ternate: Universitas Khairun.
- Aditia. A. M. N, Ni Putu Martini Dewi. 2018. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Ekonomi Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Universitas Udayana Bali*.
- Adhadika. T., Arif Pujiyono. 2014. Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas tenaga Kerja Industri Pengolahan Di Kota Semarang.
- Andreas, R. 2012. Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan dan Investasi Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Di Kota Medan. *Skripsi*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Andika, R. (2018). Pengaruh Kemampuan Berwirausaha dan Kepribadian Terhadap Pengembangan Karir Individu Pada Member PT. Ifaria Gemilang (IFA) Depot Sumatera Jaya Medan. *JUMANT*, 8(2), 103-110.
- Arsyad, Lincoln. 2010. Ekonomi Pembangunan. *Yogyakarta: STIE YKPN*
- Asih, S. (2018). Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah Dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Belanja Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pemerintah Kabupaten Dan Kota. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(1), 177-191.
- Aquariansyah, F. 2018. Analisis pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Bandar Lampung Tahun 2010-2016 dalam Persepektif Ekonomi Islam. *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Chodariyanti, L. 2016. Pengaruh Alokasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Jember. *Jurnal Ekonomi Bisnis*. Jawa Timur: Universitas Islam Lamongan.
- Fauji, Z. 2017. Pengaruh Belanja Bidang Infrastruktur, Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung. *Skripsi*. Lampung: Universitas Lampung.

- Harahap, R. (2018). Pengaruh Kualitas produk Terhadap Kepuasan Pelanggan di Restoran Cepat saji Kfc Cabang Asia Mega Mas Medan. *JUMANT*, 7(1), 77-84.
- Hidayat, R. (2018). Kemampuan Panel Auto Regressiv Distributed Lag Dalam Memprediksi Fluktuasi Saham Property And Real Estate Indonesia. *JEpa*, 3(2), 133-149.
- Herdyaningsih. R., Ansofino., Yosi Eka Putri. 2016. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, PAD, Inflasi dan Pengangguran Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Padang Tahun 2010-2015. *Jurnal*. Padang: STKIP PGRI Sumatera Barat.
- Irawan, I., & Pramono, C. (2017). Determinan Faktor-Faktor Harga Obligasi Perusahaan Keuangan Di Bursa Efek Indonesia.
- Kahang. M., dkk. 2016. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Samarinda*: Universitas Mulawarman.
- Kholik, K. (2018, October). Effect of Self-Efficacy and Locus of Control on Small and Medium Entertainment Small Scale. In International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP) (Vol. 1, No. 1, pp. 214-225).
- Mesra, B. (2018). Factors That Influencing Households Income And Its Contribution On Family Income In Hamparan Perak Sub-District, Deli Serdang Regency, North. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(10), 461-469.
- Nasution, M. D. T. P., Rossanty, Y., Achmad Daengs, G. S., Sahat, S., Rosmawati, R., Kurniasih, N., ... & Rahim, R. (2018). Decision support rating system with Analytical Hierarchy Process method. *Int. J. Eng. Technol*, 7(2.3), 105-108.
- Putri. D.K.A.Y, Sri Kusreni. 2017. Analisis Pengaruh Tingkat Kesehatan, Tingkat Pendidikan, Dan Upah Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*: Universitas Airlangga.
- Rahmat. A, dkk. 2016. Analisis Produktivitas Tenaga Kerja Di Provinsi Jambi.
- Rahmat. S. 2018. Dampak Perubahan Budaya Sosial Ekonomi Terhadap Kemiskinan dan Kesejahteraan pada Masyarakat Desa Pahlawan. *Jurnal JEPA*: Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
- Rahmat. S. 2018. Pengaruh Nilai Tukar Nelayan ( Pendapatan Nelayan, Pendapatan Non Nelayan, Pengeluaran Nelayan, Pengeluaran Non Nelayan ) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat ( Pendidikan, Kondisi Fisik

Rumah) Di Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram. *Jurnal JEPA: Universitas Pembangunan Panca Budi Medan*.

- Rahayu, S. (2018). Pengaruh Motivasi dan Disiplin Terhadap Prestasi Kerja Karyawan di PT. Langkat Nusantara Kepong Kabupaten Langkat. *JUMANT*, 9(1), 115-132.
- Ritonga, H. M., Hasibuan, H. A., & Siahaan, A. P. U. (2017). Credit Assessment in Determining The Feasibility of Debtors Using Profile Matching. *International Journal of Business and Management Invention*, 6(1), 73079.
- Rembet. T.S, Vekie A. Rimate, George M. V. Kawung. 2017. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Utara Periode Tahun (2005-2014). *Jurnal Manado: Universitas Sam Ratulangi Manado*.
- Rossanty, Y., Hasibuan, D., Napitupulu, J., Nasution, M. D. T. P., & Rahim, R. (2018). Composite performance index as decision support method for multi case problem. *Int. J. Eng. Technol*, 7(2.29), 33-36.
- Safitri. I. 2016. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pendidikan, dan Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Aceh. *Jurnal Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala*.
- Samrin, S., Irawan, M., & Se, M. (2019). Analisis Blue Ocean Strategy Bagi Industri Kerajinan Di Kota Tanjung Balai. *Jurnal Manajemen*, 11(1).
- Sari, I. (2018). Motivasi belajar mahasiswa program studi manajemen dalam penguasaan keterampilan berbicara (speaking) bahasa Inggris. *JUMANT*, 9(1), 41-52.
- Sanggalorang. M. M . S, Vakie A. Rimate, Hanly F. DJ. Siwu. 2015. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Sulawesi Utara. *Jurnal Manado: Universitas Sam Ratulangi Manado*.
- Sanusi. A, Mohammad Yusuf. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Produk Domestik Bruto, Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Daerah Di Sumatera Utara Tahun 2013-2015 Pendekatan Panel Regression. *Jurnal JEPA: Universitas Pembangunan Panca Budi Medan*.
- Setiawan, N. (2018). Peranan Persaingan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan (Resistensi Terhadap Transformasi Organisasional). *JUMANT*, 6(1), 57-63.
- Sidubatar, Dwindi. 2013. Pengaruh Belanja Kesehatan Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2008-2010. *Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro*.

- Siregar, N. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Beli Konsumen Dalam Menggunakan Indihome Sebagai Penyedia Jasa Internet Di Kota Medan (Studi Kasus Kantor Plaza Telkomcabang Iskandar Muda No. 35 Medan Baru). *JUMANT*, 7(1), 65-76.
- Sugiarto. 2013. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota Sektor Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmu Ekonomi*: Universitas Syah Kuala.
- Sunarni. 2017. Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Se-Indonesia. *Jurnal. Bandar Lampung*: Universitas Lampung.
- Suparno, H. 2014. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Kalimantan Timur. *Skripsi. Samarinda*: Universitas Mulawarman.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 49 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 171 Tentang APBN.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2002 Pasal 1 Tentang APBD.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 2 Tentang Anggaran Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960, Bab 1 dan Bab 2 Tentang Kesehatan.



